



P U T U S A N
No. 2521 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj.
bin HENDRO GUNAWAN ;

Tempat lahir : Pacitan ;

Umur/tanggal lahir : 51 tahun/10 Februari
1957 ;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. DR. Wahidin No. 4 Kelurahan
Ketanggi, Kecamatan Ngawi,
Kabupaten Ngawi ;

A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan : PNS (Wadir Administrasi RSJD
Surakarta) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri
Surakarta karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin
HENDRO GUNAWAN selaku Ymt Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta berdasarkan Surat
Penugasan Direktur Rumah Sakit Jiwa Surakarta Nomor :
KP.00.03.2563 tanggal 18 Desember 2004 secara bersama- sama
atau bertindak sendiri- sendiri dengan dr. Siti Nuraini
Arief, Sp.Kj, dr. Rukma Astuti dan dr. Hendrina A.K.,
Sp.Kj. (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari
Selasa tanggal 11 Oktober 2005 sampai dengan pada hari
Jum'at tanggal 04 Agustus 2006 atau setidaknya- tidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006,
bertempat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Jalan Ki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajar Dewantoro XII Jebres Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari adanya surat Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Nomor : PR.03.02.1.1.4060 tertanggal 16 September 2005 perihal Permintaan Isian Form Verifikasi RS/BP4/BKMM yang salah satu itemnya berupa daftar isian pengajuan dana penggantian defisit Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang Kesehatan Tahun 2004 yang ditujukan kepada pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta. Atas surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Medik DEPKES RI tersebut, meskipun di RSJD Surakarta tidak mengalami defisit dalam pengelolaan dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM Bid Kes) tetapi Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN selaku Ymt Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang memiliki dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam SK Menteri Kesehatan RI Nomor : 135/MENKES/SK/IV/78 tanggal 28 April 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) SK Menteri Kesehatan tersebut yaitu Tugas Wakil Direktur adalah di Bidang Pengawasan dan Koordinasi yang selanjutnya ditetapkan oleh Direktur, tugas pokok dan fungsi selaku YMT Wadir Umum dan Keuangan RSJD Surakarta sebagaimana diatur Pedoman Penyusunan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Pemerintah dari Direktorat Kesehatan Jiwa pada Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI di Jakarta tahun 1993 adalah sebagaimana diatur dalam BAB III Jabaran Kerja Wakil Direktur Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bertugas : Dibidang Pengawasan dan Koordinasi yang selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Fungsi Wakil Direktur Umum adalah : melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan tugas : Kepala Bagian Sekretariat, Kepala Bidang Penunjang Medik, Kepala Instalasi Apotik, Kepala Instalasi Laboratorium, Kepala Instalasi Gizi, Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit. Adapun uraian tugas disebutkan :
Kordinasi

Tahap Perencanaan :

Menilai dan menyasrakan rencana kebutuhan dan kegiatan dari Pimpinan Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;

Mengkordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan kegiatan dari Pimpinan Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;

Melaporkan rencana kebutuhan dan kegiatan dari Pimpinan/Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya kepada Direktur ;

Tahap pelaksanaan :

Memantau pelaksanaan kegiatan dari Pimpinan Satuan Kerja yang berada didalam koordinasinya ;

Membimbing dan melakukan motivasi atas pelaksanaan kegiatan dari Pimpinan Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;

Menggerakkan pelaksanaan disiplin pegawai dari satuan kerja di dalam koordinasinya ;

Memantau administrasi Diktat di Rumah Sakit ;

Tahap Evaluasi dan Pelaporan :

Meneliti dan mengevaluasi semua laporan kegiatan dari Pimpinan Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;

Menyusun laporan evaluasi semua kegiatan dari Pimpinan/Satuan Kerja di dalam koordinasinya ;

Pengawasan :

Tahap Perencanaan :

Hal. 3 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memantau dan menilai pelaksanaan prosedur dan mekanisme perencanaan dari Pimpinan Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;

Tahap Pelaksanaan :

Memantau pelaksanaan kegiatan dari Pimpinan Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;

Tahap Evaluasi dan Pelaporan :

Meneliti dan mengevaluasi semua laporan kegiatan dari pimpinan/satuan kerja di dalam koordinasinya ;

Menyusun laporan evaluasi semua kegiatan dari Pimpinan/Satuan Kerja di dalam koordinasinya ;

Sebagai Ketua Tim Pemeriksaan Intern Uang/Barang ;

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan disiplin pegawai, serta memberikan bahan penilaian untuk pengisian DP3 oleh Pimpinan/Satuan Kerja di dalam koordinasinya kepada Direktur ;

WEWENANG :

Menilai rencana kebutuhan/kegiatan dari Pimpinan/Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;

Mengarahkan pelaksanaan kegiatan dari Pimpinan/Satuan Kerja di dalam koordinasinya ;

Memberikan pertimbangan kepada Direktur yang berkaitan dengan mutasi, penempatan, cuti, sanksi, promosi, dan penghargaan dari Pimpinan Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;

TANGGUNG JAWAB :

Keserasian rencana kebutuhan dan kegiatan dari Pimpinan/Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;

Kelancaran prosedur pelaksanaan kegiatan dari Pimpinan/Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;

Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari Pimpinan/Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;

Kebenaran hasil kerja Tim Pemeriksaan Intern uang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ;

Upaya penegakan disiplin pegawai dari Pimpinan/Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya dan atas kebenaran bahan penilaian untuk pengisian DP3 dari Pimpinan/Satuan Kerja tersebut ;

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya ;

Serta memiliki tugas pokok dan fungsi selaku YMT Wadir Umum dan Keuangan RSJD Surakarta sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur RSJP Surakarta Nomor : KP.01.02.1376 tanggal 20 Agustus 1997 tentang Pendelegasian Wewenang adalah sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Direktur RSJP Surakarta yaitu :

Menghadiri rapat-rapat dinas ;

Melakukan pengaturan, koordinasi dan pengawasan serta pengambilan langkah/tindakan yang dianggap perlu dalam penyelenggaraan Rumah Sakit ;

Menanda tangani surat-surat rutin sebatas kewenangan dan khususnya yang tidak terkait langsung dengan masalah keuangan ;

Menandatangani Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan surat-surat lain sejenis yang bersifat mendesak ;

Selaku Ymt Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN dengan menyatakan dirinya sebagai Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSJD Surakarta atas nama Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan surat Nomor : 460/3414/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005 mengusulkan defisit penggantian dana untuk PKPS BBM Bid Kes Tahun 2004 sebesar Rp. 2.334.505.334,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) kepada Menteri Kesehatan RI di Jakarta untuk pelayanan kesehatan pasien miskin di RSJD Surakarta dengan cara yang tidak benar, yaitu :

Hal. 5 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memasukkan data pasien miskin yang tidak benar tanggal 27 November 2002 s/d 31 Desember 2002, tanggal 01 Januari 2003 s/d 31 Desember 2003, tanggal 01 September 2004 s/d 31 Desember 2004, karena telah dibayarkan atau dibiayai oleh Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2004 dan juga memasukan data pasien miskin yang mendapat keringanan biaya pengobatan sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang seharusnya tidak berhak mendapatkan biaya PKPS BBM Bid Kes selaku pasien miskin ;

Tanda tangan dan stempel persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang pada waktu itu dijabat oleh dr. BUDIHARDJA, DTM & H, MPH yang tercantum dalam surat pengusulan penggantian defisit PKPS BBM Bid Kes tahun 2004 Nomor : 460/3414/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005 adalah tidak benar atau palsu ;

Bahwa pengajuan penggantian dana defisit PKPS BBM Bid Kes Tahun 2004 yang diajukan oleh Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN atas nama Direktur RSJD Surakarta disetujui oleh Menteri Kesehatan RI dengan Surat Keputusan Nomor : 02/Menkes/ SK/I/2006 tanggal 04 Januari 2006 tentang Penggantian Defisit Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang Kesehatan untuk Pelayanan Pasien Miskin tahun 2004, yang menyebutkan bahwa RSJD Surakarta mendapatkan dana sebesar Rp. 2,334,505,334,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Untuk mencairkan dana tersebut diperlukan data pendukung berupa data jumlah pasien miskin yang telah dilayani oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Itjen Depkes RI) ;

Pada bulan Februari 2006 pada saat dr. Siti Nur Aini Arief



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Kj. yang sebelumnya sejak bulan Januari 2006 menjabat sebagai Direktur RSJD Surakarta, telah datang Tim Verifikasi dari Itjen Depkes RI ke RSJD Surakarta dengan tugas dan tujuan melakukan verifikasi data pendukung usulan pengajuan dana penggantian defisit PKPS BBM Bidang Kesehatan Tahun 2004 sebagaimana yang telah diusulkan sebelumnya oleh Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN selaku Wadir Administrasi dan Keuangan RSJD Surakarta ;

Pada saat Tim Verifikasi Itjen Depkes RI melakukan Verifikasi telah meminta data pasien miskin berupa data pasien miskin rawat jalan dan data pasien miskin rawat inap yang telah ditangani RSJD Surakarta sebagai kelengkapan syarat pencairan pengganti dana defisit PKPS BBM tahun 2004 yang diajukan sebelumnya oleh Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN. Atas permintaan dari Tim Verifikasi Itjend Depkes RI tersebut. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2006 dr. Siti Nur Aini Arief Sp.Kj. telah melengkapi dan menyerahkan data yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua Verifikasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yaitu dr. Hendrina AK, Sp.Kj. dan Ketua Pengelola Dana PKPS BBM yaitu dr. Rukma Astuti tersebut serta diketahui dan ditandatangani oleh dr. SITI NURAINI ARIEF, Sp.Kj. selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Tim Verifikasi Itjend Depkes RI yaitu :

Data nama-nama pasien miskin yang telah dibayarkan atau dibiayai oleh anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2004 ;

Data pasien miskin yang mendapat keringanan biaya pengobatan sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang seharusnya tidak berhak mendapatkan biaya PKPS BBM Bid Kes selaku pasien miskin, yaitu :

NO.	BULAN	RAWAT JALAN		RAWAT INAP			JUMLAH UANG
		GAKIN	JUMLAH Rp	GAKIN	HARI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	November 2002	175 org	4.777.800	14 org	673	21.735.789	26.513.589

Hal. 7 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



2.	Desember 2002	186 org	5.276.375	103 org	4.949	162.437.260	167.713.635
3.	Januari 2003	192 org	5.564.025	114 org	4.665	161.040.515	166.604.540
4.	Februari 2003	171 org	4.959.795	89 org	3.485	118.572.890	123.532.685
5.	Maret 2003	214 org	6.160.690	125 org	5.284	174.506.300	180.666.990
6.	April 2003	222 org	6.415.458	119 org	5.170	173.495.450	179.910.908
7.	Mei 2003	194 org	5.505.160	97 org	3.406	114.464.015	119.969.175
8.	Juni 2003	220 org	6.101.575	111 org	3.887	144.398.760	150.500.335
9.	Juli 2003	232 org	6.700.510	94 org	3.280	117.436.500	124.137.010
10.	Agustus 2003	228 org	6.367.405	99 org	4.127	138.082.400	144.44.805
11.	September 2003	211 org	6.175.490	123 org	4.379	147.081.400	153.256.890
14.	Desember 2003	240 org	6.706.975	118 org	4.638	150.354.700	157.061.675
15.	September 2004	230 org	6.466.750	30 org	891	27.331.610	33.798.360
16.	Oktober 2004	229 org	6.886.075	105 org	2.315	72.85.150	78.971.225
17.	November 2004	218 org	6.316.435	111 org	2.473	79.428.950	85.745.385
18.	Desember 2004	238 org	6.743.445	1 Olorg	2.023	66.610.675	73.354.120
Jumlah		3.811 org	108.736.098	1.782 org	63.745	2.134.884.879	2.243.670.977

Perbuatan Terdakwa memasukkan data pasien yang mendapat keringanan sampai dengan 50% tersebut, bertentangan dengan SK Menkes RI No. 553/MenKes/SK/IV/2003 tertanggal 22 April 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPS-BBM BIDKES karena mengambil data yang sudah dibayarkan oleh APBD Provinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya data pasien RSJD Surakarta diverifikasi oleh Tim Verifikasi Itjen Depkes RI yang hasilnya Tim Verifikasi Itjen Depkes RI menyatakan bahwa RSJD Surakarta mengalami defisit sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 90.834.357,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dari dana penggantian defisit PKPS BBM Bid Kes yang diajukan RSJD Surakarta sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.334.505.334,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Atas temuan Tim Verifikasi Itjen Depkes RI tersebut, kemudian pada tanggal 20 Juni 2006, dengan sepengetahuan dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj., RSJD Surakarta mengembalikan kelebihan dana penggantian defisit PKPS BBM Bid Kes Tahun 2004 sebesar Rp. 90.834357,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas Negara melalui Kantor Bank BRI Cabang Solo ;

Kemudian pada tanggal 16 Mei 2006 dr. Siti Nuraini A., Sp.Kj. selaku Direktur RSJD Surakarta telah memerintahkan kasir penerima yaitu Nur Rosyid untuk mencairkan dana pengganti defisit PKPS BBM Bid Kes sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) di Bank Britama BRI Surakarta, selanjutnya dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj. melalui memo atau surat tanggal 04 Mei 2006 kepada Nur Rosyid, agar dana tersebut disetorkan ke kas Daerah Penda Provinsi Jawa Tengah sebagai Pendapatan RSJD Surakarta, kemudian disetorkan dengan surat tanda setoran Nomor : 109/RSJD/Slo/2006 Bank Cabang Jateng dengan Nomor Rekening : 1034.01503.7 sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Padahal dana sejumlah tersebut tidak merupakan Pendapatan RSJD Surakarta ;

Dari penyetoran dana Penggantian Defisit PKPS BBM Bid Kes tahun 2004 sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah ,yang oleh dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj. diakui sebagai pendapatan RSJD Surakarta tersebut, pihak RSJD Surakarta menerima pengembalian dari Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 30% sejumlah Rp. 673.101.293,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sebagai uang jasa pelayanan, yang semestinya sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah yang berbunyi kepada instansi pemungut retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari realisasi retribusi yang disetorkan ke

Hal. 9 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah, tidak dibenarkan menerima pengembalian uang sebesar 30% tersebut karena uang sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang disetorkan tersebut bukan merupakan hasil pendapatan RSJD Surakarta, selain menerima pengembalian yang tidak benar sejumlah Rp. 673.101.293,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), RSJD Surakarta juga menerima jasa pelayanan rutin yang resmi dari Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk bulan Mei 2006 sebesar Rp. 58.139.640,00 (lima puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) diterima melalui transfer ke rekening Direktur RSJD Surakarta yang seluruhnya sejumlah Rp. 731.240.933 (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

Berdasarkan memo atau surat dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj. selaku Direktur RSJD Surakarta tanggal 17 Juni 2006 kepada Tim PKPS BBM/JPS BK tahun 2002, 2003 dan 2004 yaitu Kusdiah, Handayani, dan Nur Rosyid untuk menyisihkan uang sebesar Rp. 495.820.495,- (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dan pada tanggal 19 Juni 2006 dana tersebut di transfer ke Bank BRI Britama atas nama Direktur RSJD Surakarta, sedangkan sisanya sebesar Rp. 235.420.438,- (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) diambil oleh Sri Handayani staf pada bagian keuangan RSJD Surakarta, dan pada tanggal 20 Juni 2006 oleh Sri Handayani atas perintah dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj. dibagikan kepada seluruh pegawai RSJD Surakarta termasuk Terdakwa seolah-olah sebagai uang jasa pelayanan, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain dengan perincian sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	N A M A	PENERIMAAN BERSIH
	DIREKTUR	
1.	dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj.	Rp. 4.057.300,-
	WAKIL DIREKTUR	
2.	dr. Dwi Priyo Hartono, Sp.Kj.	Rp. 2.704.900,-
3.	dr. H. Sigit Wahyu Purnomo, Sp.Kj.	Rp. 2.704.900,-
	KABAG & KABID	
4.	Drs. Joko Supomo	Rp. 1.352.400,-
5.	Dra. Sutarmi, Apt.	Rp. 1.352.400,-
6.	Suranto, AMK.	Rp. 1.352.400,-
7.	dr. Ita	Rp. 1.352.400,-
	KA.SUBAG & KA.SIE	
8.	Slamet, SH.M.Hum.	Rp. 1.014.300,-
9.	Drs. Bambang Supriyono	Rp. 1.014.300,-
10.	Drs. Slamet Budi Prasetyo	Rp. 1.014.300,-
11.	Pribadi Suharjo, BA.	Rp. 1.014.300,-
12.	Yuliati, SH.	Rp. 1.014.300,-
13.	Harjono, AMK.	Rp. 1.014.300,-
14.	Dra. Sri Wahyuni, Apt.	Rp. 1.014.300,-
15.	Sri Wiyani, SMPH.SKM	Rp. 1.014.300,-
16.	Yetty Mulyati	Rp. 1.014.300,-
17.	Bagus Alit Putra, SKM	Rp. 1.014.300,-
18.	Sri Indari, AMK.	Rp. 1.014.300,-
19.	Endang Setyaningsih	Rp. 1.014.300,-
20.	Sukardi, S.Kp.	Rp. 1.014.300,-
	PSIKIATER	
21.	dr. Hendrina A. Kuhuwael, Sp.Kj.	Rp. 784.500,-
22.	dr. Rahayu Budi Mulyanto, Sp.Kj.	Rp. 775.800,-
	DOKTER UMUM	
23.	dr. Bambang Hirjanto	Rp. 673.600,-
24.	dr. Wibowo	Rp. 645.200,-
25.	dr. Rukma Astuti	Rp. 645.200,-
26.	dr. Heniwati	Rp. 685.000,-
27.	dr. H. Amsal, AM.MHA.	Rp. 702.000,-
28.	dr. Setyowati Raharjo	Rp. 594.000,-
29.	dr. Rino Pratondo Adji	Rp. 588.400,-
30.	dr. Fitra Primanditha	Rp. 588.400,-
	DOKTER HARLEP	
31.	dr. Hasanudin	Rp. 409.300,-
32.	dr. Safrudin	Rp. 409.300,-
33.	dr. Adriesta Herdaetha	Rp. 409.300,-
	DOKTER GIGI	
34.	drg. Noviasari SS.	Rp. 540.000,-
	PSIKOLOG	
35.	Dra. Sri Karmini	Rp. 570.800,-
36.	Dra. Endang Suparti SS.	Rp. 505.900,-
37.	Dra. M.M. Indah Sundari	Rp. 551.400,-
38.	Dra. Sepi Indriyati	Rp. 483.200,-
39.	Miratun Hasanah, S.Psi.	Rp. 454.800,-
40.	Ismiyati Yuliatur, S.Psi.	Rp. 449.100,-
41.	Drs. Partana, Apt.	Rp. 579.800,-
42.	Dra. Trihidayati, Apt.	Rp. 488.900,-
43.	Drg. Budiyanto	Rp. 528.700,-
	KA. BANGSAL	
44.	Yati Suryati	Rp. 488.900,-
45.	Sri Muljanti	Rp. 488.200,-
46.	Suyoko	Rp. 466.100,-
47.	Agus Sutoko	Rp. 460.500,-
48.	Lukas Mudjijono	Rp. 397.900,-

Hal. 11 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	Anik Sundari	Rp.	471.800,-
50.	Warno, Skep.	Rp.	466.100,-
51.	Sa'adah	Rp.	454.800,-
52.	Ni Wayan Margitri	Rp.	511.600,-
53.	Ruth Herawati	Rp.	488.900,-
54.	Okawati Herni Saefutri, S.Kep.	Rp.	528.700,-
55.	Sudarni	Rp.	494.800,-
56.	Untung Saifurahmawan	Rp.	403.600,-
57.	Drs. Supriyono	Rp.	579.800,-
STAFF UPF			
58.	Purwanto	Rp.	392.200,-
59.	Kusuma Wardani	Rp.	386.600,-
60.	Hadi Yuwono	Rp.	483.200,-
61.	Agus Suharyanto	Rp.	329.700,-
PERAWAT DAN PP			
62.	Eko Sunaryanti	Rp.	358.100,-
63.	Emy Farida Indriawati	Rp.	255.800,-
64.	Siti Musyarifah	Rp.	352.400,-
65.	Siti Puji Mulyani	Rp.	295.600,-
66.	Titik Supriyati	Rp.	272.900,-
67.	Sulami	Rp.	227.400,-
68.	Sutanti	Rp.	244.400,-
69.	Dyah Suprihatin	Rp.	210.300,-
70.	Suci Sarkawini	Rp.	238.800,-
71.	Arum Aryandari, Skep.	Rp.	324.000,-
72.	Yulius Kriswanto, Skep.	Rp.	352.400,-
73.	Nuning Purwanti	Rp.	363.800,-
74.	Rita Tri Soebekti, Skep.	Rp.	341.100,-
75.	Sumarti	Rp.	253.000,-
76.	Sri Suparti	Rp.	272.900,-
77.	Sunarwi	Rp.	278.500,-
78.	Agnes Giyarni	Rp.	267.200,-
PERAWAT			
79.	Lilia Dwi Pujiastuti	Rp.	375.200,-
80.	Sri Sutarmi	Rp.	403.600,-
81.	Mardi Utomo	Rp.	369.500,-
82.	Budiyono	Rp.	369.500,-
83.	Rini Sunaryati	Rp.	375.200,-
84.	Timin	Rp.	341.100,-
85.	Tri Wahyudiyanto	Rp.	307.000,-
86.	Sugiyono	Rp.	307.000,-
87.	R. Agus Mardianto	Rp.	307.000,-
88.	Sri Pujiati	Rp.	363.800,-
PEKARYA PERAWATAN			
89.	Kushartono	Rp.	335.400,-
90.	Suldi	Rp.	307.000,-
91.	Sri Riyani	Rp.	349.600,-
92.	Tri Winarni	Rp.	364.300,-
93.	Maskuri (UGD)	Rp.	321.200,-
94.	Sumiyannah	Rp.	264.300,-
95.	Suratno UGD	Rp.	335.400,-
96.	Winarno	Rp.	261.500,-
97.	Sutrisna	Rp.	326.900,-
98.	Sri Mulyani	Rp.	284.200,-
99.	Sumardi REHAB	Rp.	307.000,-
100.	Sumiyarsana	Rp.	335.400,-
101.	Ratno	Rp.	321.200,-
102.	Paiman	Rp.	341.100,-
103.	Mulyono	Rp.	295.600,-
104.	Marimin	Rp.	244.400,-
105.	Warsito	Rp.	244.400,-
106.	Wardani	Rp.	244.400,-
107.	Subari	Rp.	221.700,-
108.	Sugiyanti	Rp.	278.500,-
PERAWAT			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109.	Mudjito	Rp.	386.600,-
110.	Fatoni	Rp.	380.900,-
111.	Widodo	Rp.	341.100,-
112.	Slamet Riyadi	Rp.	346.800,-
113.	Inalisa Mudono	Rp.	369.500,-
114.	Siti Taslimah	Rp.	375.200,-
115.	M. Mispan	Rp.	369.500,-
116.	Jaka Mursito	Rp.	369.500,-
117.	Supriyanto	Rp.	460.500,-
118.	Nurwindyah Widiningsih	Rp.	341.100,-
119.	Sri Haryati	Rp.	392.200,-
120.	Ni Ketut Mudiari	Rp.	369.500,-
121.	Suranto	Rp.	346.800,-
122.	Sri Winarti	Rp.	307.000,-
123.	Arman Susanto	Rp.	329.700,-
124.	Irwan Heru Priyanto	Rp.	329.700,-
125.	Mardini, Skep	Rp.	505.900,-
126.	Sugiyana	Rp.	329.700,-
127.	Kustini	Rp.	346.800,-
128.	Siti Nurchaeni	Rp.	352.400,-
129.	Andi Nugroho	Rp.	335.400,-
130.	Muhammad Z.A.	Rp.	307.000,-
131.	Joko Sri Pujianto, S.Kep.	Rp.	352.400,-
132.	Imam Rifai	Rp.	352.400,-
133.	Muhammad Sukandar	Rp.	324.000,-
134.	Ahmad Rafiq Muhajir	Rp.	352.400,-
135.	Yuli M. Kartiko	Rp.	307.000,-
136.	Setyo Priyono	Rp.	335.400,-
137.	Ahmad Su'ib	Rp.	307.000,-
138.	Sumianto	Rp.	329.700,-
139.	Paridi	Rp.	289.900,-
140.	Mujiyono, S.Kep.	Rp.	341.100,-
141.	Edy Wiyono	Rp.	301.300,-
142.	Sri Rahayu	Rp.	253.000,-
143.	Nunuk Sri Sejatiningasih	Rp.	301.300,-
144.	Heru Sriyanto, Amk.	Rp.	301.300,-
145.	Tri Setya Budiyantha, Amk.	Rp.	272.900,-
146.	Sri Mulyani, Amk.	Rp.	272.900,-
147.	Yunita Widyastuti, Amk.	Rp.	272.900,-
148.	Joko Kuncoro	Rp.	289.900,-
149.	Afik Driyanto, S.Kep.	Rp.	369.500,-
150.	Adi Dwi Priyanto Purnomo	Rp.	301.300,-
151.	Agus Sriyanto	Rp.	235.900,-
152.	Heru Sapto Budiyanto, S.Kep.	Rp.	369.500,-
153.	Pupus Risnawati	Rp.	289.900,-
154.	Lilik Sri Wahyuni	Rp.	318.300,-
155.	Yuli Sumarni	Rp.	289.900,-
156.	Milan Rahmawati	Rp.	278.500,-
157.	Riyati	Rp.	250.100,-
158.	Ariyani	Rp.	278.500,-
159.	Yuli Purwaningsih	Rp.	275.700,-
160.	Sri Rahayu	Rp.	238.800,-
161.	Sulistiyowatik	Rp.	278.500,-
162.	Pudji Lestari	Rp.	289.900,-
163.	Djoko Witoyo	Rp.	278.500,-
164.	Eko Budi Raharjo	Rp.	278.500,-
165.	Supriono	Rp.	278.500,-
166.	Puji Rahayu	Rp.	250.100,-
167.	Suwito	Rp.	250.100,-
168.	Dwi Sri Hartanti	Rp.	278.500,-
169.	Suparmi	Rp.	238.800,-
170.	Yenita Antonio	Rp.	278.500,-
171.	Yuni Widayanti	Rp.	278.500,-
172.	Hidayat	Rp.	250.100,-
173.	Supriyanto	Rp.	238.800,-

Hal. 13 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174.	Kusumastuti Retno	Rp.	272.900,-
175.	Sri Handayani	Rp.	272.900,-
176.	Ita Agustina	Rp.	261.500,-
177.	Luluk Purnomo	Rp.	231.100,-
178.	Bagyo	Rp.	261.500,-
179.	Titin Trinawan	Rp.	221.700,-
PEKARYA PERAWATAN			
180.	Sri Subagiyo UP	Rp.	295.600,-
181.	F.X. Edy Sutikno	Rp.	278.500,-
182.	Priyanto	Rp.	278.500,-
183.	Madyo Wilopo	Rp.	292.800,-
184.	Sutirah	Rp.	278.500,-
185.	Sardjiman	Rp.	253.000,-
186.	Titus Suwarno	Rp.	287.100,-
187.	Triyatno	Rp.	270.000,-
188.	Kasimin	Rp.	284.200,-
189.	Purwanto	Rp.	321.200,-
190.	Wiyono	Rp.	321.200,-
191.	Suradji	Rp.	255.800,-
192.	Suparno Rubiyanto	Rp.	255.800,-
193.	Suyati	Rp.	309.800,-
194.	Agus Sriyanto	Rp.	309.800,-
195.	Suparto	Rp.	253.000,-
196.	Riyanto	Rp.	253.000,-
197.	Suparno	Rp.	295.600,-
198.	Supadno	Rp.	281.400,-
199.	Mardiyatmi	Rp.	253.000,-
200.	Joko Triyono	Rp.	275.700,-
201.	Sumardjo	Rp.	301.300,-
202.	Murpiati	Rp.	289.900,-
203.	Sugiyatmi	Rp.	267.200,-
204.	Suwarno	Rp.	250.100,-
205.	Sulastri	Rp.	221.700,-
206.	Ngadino	Rp.	193.300,-
207.	Sri Sunarni	Rp.	227.400,-
208.	Suparman	Rp.	216.000,-
209.	Mujiyo	Rp.	241.600,-
210.	Sumarso	Rp.	284.200,-
211.	Suparna	Rp.	284.200,-
212.	Sukarman	Rp.	238.800,-
213.	Totok Sutarno	Rp.	224.500,-
214.	Suharni	Rp.	224.500,-
215.	Sutarja	Rp.	230.200,-
216.	Sumardi, Adm. Fis.	Rp.	216.000,-
217.	Parno GIZI	Rp.	272.900,-
218.	Surahmi	Rp.	238.800,-
219.	Paidi	Rp.	224.500,-
220.	Sudinaryo	Rp.	238.800,-
221.	S. Sri Soetarni	Rp.	250.100,-
222.	Intiyartini	Rp.	210.300,-
223.	Sunarto	Rp.	230.200,-
224.	Slamet Suryadi	Rp.	210.300,-
225.	Hartoyo GIZI	Rp.	267.200,-
226.	Edy Rahmadi GIZI	Rp.	307.000,-
PARAMEDIS NON PERAWATA N			
227.	Endang Rochini	Rp.	366.700,-
228.	Kade Fini Irawati	Rp.	443.400,-
229.	Suyono	Rp.	295.600,-
230.	Heru Kriswanto	Rp.	309.800,-
231.	Darmawan Jufri	Rp.	338.200,-
232.	Woro Kamarina	Rp.	466.100,-
233.	Jumadil Rosta	Rp.	338.200,-
234.	Ngatmiyatun	Rp.	304.100,-
235.	Ririn Ernawati	Rp.	361.000,-
236.	Puji Hartati SKM	Rp.	329.700,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237.	Naryo	Rp.	275.700,-
238.	Madyo Utoro	Rp.	224.500,-
239.	E. Bkti Susi Utami	Rp.	275.700,-
240.	Teguh Broto HS.	Rp.	275.700,-
241.	Aris Wibowo, ST.	Rp.	329.700,-
242.	Endah Sri Suharti	Rp.	315.500,-
243.	Dwi Harimurti	Rp.	372.300,-
244.	Sri Parwijati	Rp.	315.500,-
245.	Suhadi	Rp.	298.400,-
246.	Dewi Purnamaningsih	Rp.	287.100,-
247.	Parniati	Rp.	270.000,-
248.	Achmad Zaenuri	Rp.	298.400,-
249.	Edi Purwanto	Rp.	349.600,-
250.	Joko Ariyanto	Rp.	264.300,-
251.	Irma Rachmawati	Rp.	258.600,-
252.	Mohamad Pujiarso	Rp.	258.600,-
REHABILITASI			
253.	Sri Redjeki	Rp.	289.900,-
254.	Sri Supartini	Rp.	301.300,-
255.	Sulasono	Rp.	386.600,-
256.	Purwanto	Rp.	301.300,-
257.	Tri Riyatni R. Parwati	Rp.	278.500,-
258.	Kadarisman	Rp.	301.300,-
259.	G. Krisnawati (Wisanggeni)	Rp.	329.700,-
260.	Srijadi	Rp.	278.500,-
261.	Sardi	Rp.	289.900,-
262.	Agus Suroyo	Rp.	292.800,-
263.	Anton Gunawan (Staf UGD)	Rp.	335.400,-
264.	Dalima	Rp.	278.500,-
265.	Tabah Suprapti	Rp.	255.800,-
266.	Retno Maruti	Rp.	250.100,-
267.	Sri Suharsi	Rp.	278.500,-
268.	Ngadiman (SENA)	Rp.	216.000,-
269.	Budi Prasadja	Rp.	216.000,-
270.	Kadi Riyanto	Rp.	221.700,-
271.	Arini Kurniati	Rp.	284.200,-
JASA KONSULTASI KHUSUS			
272.	dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj.	Rp.	495.820.495,-
273.	dr. Hendrina A. Kuhuwael, Sp.Kj.	Rp.	1.840.800,-
274.	dr. Sigit Wahyu Purnomo, Sp.Kj.	Rp.	23.764.200,-
275.	dr. Dwi Priyo Hartono, Sp.Kj.	Rp.	3.047.500,-
276.	dr. Bambang Hirjanto	Rp.	703.000,-
277.	dr. Heniwati	Rp.	527.500,-
278.	dr. Rukma Astuti	Rp.	872.500,-
279.	dr. Dwi Priyo Hartono, Sp.Kj.	Rp.	5.402.200,-
280.	dr. Ita	Rp.	454.500,-
281.	drg. Budiyanto	Rp.	64.500,-
282.	dr. Setyowati	Rp.	436.500,-
283.	drs. Partana, Apt.	Rp.	618.600,-
284.	Ida Bagus Alit Putra, Amk.	Rp.	1.085.000,-
285.	Dra. Dwi Faridayanti	Rp.	697.400,-
286.	Dra. Sri Karmini	Rp.	168.700,-
287.	Kade Fini Irawati	Rp.	422.000,-
288.	dr. H. Amsal AM., MHA.	Rp.	946.000,-
289.	dr. Rino Pratondo Adji	Rp.	696.000,-
290.	dr. Fitra Primanditha	Rp.	399.500,-
291.	dr. Agung	Rp.	1.431.000,-
292.	dr. Rahayu Budi Mulyanto, Sp.Kj.	Rp.	1.845.300,-
DOKTER JAGA			
293.	dr. Etha	Rp.	200.000,-
294.	dr. Rino	Rp.	360.000,-
295.	dr. Agung P.	Rp.	200.000,-
296.	dr. Hasanudin	Rp.	240.000,-
297.	dr. Sumarji	Rp.	120.000,-
298.	dr. Nugraheni	Rp.	160.000,-

Hal. 15 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299.	dr. Safrudin	Rp.	80.000,-
	PELAYANAN ADMINISTRASI		
300.	Basuki Murlijanto	Rp.	366.700,-
301.	Drs. Sri Munir	Rp.	500.200,-
302.	Drs. Munawir	Rp.	432.000,-
303.	Dra. Dwi Faridayanti	Rp.	528.700,-
304.	Dra. C. Anik Irawati	Rp.	500.200,-
305.	Dra. ME. Kusdyah SW.	Rp.	642.400,-
306.	Drs. Sarjana	Rp.	420.700,-
307.	Sumina, SIP.	Rp.	432.000,-
308.	Dra. Dyah Sri Marwati	Rp.	466.100,-
309.	Setya Budi Harsana, SE.	Rp.	366.700,-
310.	Sudiyanto, Bsc.	Rp.	409.300,-
311.	Soewardji	Rp.	312.700,-
312.	Retno Suryaningsih	Rp.	309.800,-
313.	Adi Sunarto	Rp.	309.800,-
314.	Suyatno	Rp.	329.700,-
315.	Sumarni M.	Rp.	318.300,-
316.	Pujiyanti	Rp.	315.500,-
317.	T.W. Djoko Suminar	Rp.	352.400,-
318.	Giyono	Rp.	369.500,-
319.	Suharno	Rp.	312.700,-
320.	Sri Giyanto	Rp.	312.700,-
321.	Sri Waliyanti	Rp.	335.400,-
322.	Raden Hery Sutanto	Rp.	449.100,-
323.	Dayaningsih	Rp.	460.500,-
324.	Hari Waskitaningsih, SE.	Rp.	406.400,-
325.	Ujiyanti	Rp.	278.500,-
326.	Agnes Widayani S.	Rp.	307.000,-
327.	Kusuma Dwi Wardani	Rp.	449.100,-
328.	Tri Kusdiati	Rp.	312.700,-
329.	Sri Ajeng Winarni	Rp.	307.000,-
330.	A. Sugeng Haryanto	Rp.	318.300,-
331.	Tangkasati	Rp.	278.500,-
332.	Johanes Suharno	Rp.	562.800,-
333.	Ratsrini	Rp.	307.000,-
334.	Siti Kustiyah	Rp.	278.500,-
335.	Mrajak	Rp.	335.400,-
336.	Sutadi	Rp.	363.800,-
337.	Witarso	Rp.	307.000,-
338.	Pudyastuti	Rp.	318.300,-
339.	Sektiono	Rp.	562.800,-
340.	Apsari Dwi Martini, S.Sos.	Rp.	375.200,-
341.	Purwanto	Rp.	307.000,-
342.	Sussi Sukarangesti	Rp.	335.400,-
343.	Siti Suryani	Rp.	335.400,-
344.	Sucipto	Rp.	392.200,-
345.	Sri Widodo	Rp.	278.500,-
346.	Widartining	Rp.	335.400,-
347.	Edy Supriyanti, SE.	Rp.	406.400,-
348.	Yohana Dwi Listiyani	Rp.	307.000,-
349.	Wisnu Setyo Budi	Rp.	289.900,-
350.	Subur Iriyanto	Rp.	335.400,-
351.	Sri Handayani	Rp.	534.400,-
352.	Dwi Fitriyanto	Rp.	449.100,-
353.	Winarsi	Rp.	534.532,-
354.	Sri Sunarni	Rp.	278.500,-
355.	Surti Winarni	Rp.	307.000,-
356.	Bima Widiagung	Rp.	449.100,-
357.	Antonius Kusumastoyo	Rp.	278.500,-
358.	Harijono	Rp.	307.000,-
359.	Kukuh Suwito	Rp.	449.100,-
360.	Giati Triyanie	Rp.	321.200,-
361.	Ning Haryuningsih	Rp.	307.000,-
362.	Sularni	Rp.	335.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363.	Sunaryo B.	Rp.	278.500,-
364.	Ratih	Rp.	307.000,-
365.	Sri Mujiyati	Rp.	307.000,-
366.	Mulati	Rp.	278.500,-
367.	Tatik Saparini (rehab)	Rp.	307.000,-
368.	Isni Yunaiti	Rp.	307.000,-
369.	Joko Hudi Rohmad	Rp.	477.500,-
370.	Sri Haryani	Rp.	301.300,-
371.	Joko Dalmadi	Rp.	329.700,-
372.	Sutiarsi	Rp.	301.300,-
373.	Sumardi	Rp.	301.300,-
374.	F.X. Bambang Soesilo	Rp.	267.200,-
375.	Adi Sunarno	Rp.	272.900,-
376.	Hartono Narodoseno (I. Farmasi)	Rp.	301.300,-
377.	Widati	Rp.	335.400,-
378.	Suroso	Rp.	278.500,-
379.	Meilatun Basukiningsih	Rp.	449.100,-
380.	Suratna	Rp.	329.700,-
381.	Marmadi	Rp.	289.900,-
382.	Djoko Utomo	Rp.	278.500,-
383.	Nur Rosyid	Rp.	471.800,-
384.	Subroto, Bc.Hk.	Rp.	307.000,-
385.	Rukiman	Rp.	295.600,-
386.	Untari	Rp.	289.900,-
387.	Marjoko	Rp.	261.500,-
388.	Sriyanto, S.Sos.	Rp.	372.300,-
389.	Dul Qodir	Rp.	375.200,-
390.	Kiyatno, SE.	Rp.	341.100,-
391.	Siti Aisyah	Rp.	378.000,-
392.	Paryanto	Rp.	284.200,-
393.	Mujiono	Rp.	426.300,-
394.	Mulyono	Rp.	264.300,-
395.	Rantono	Rp.	227.400,-
396.	Totok Hardiyanto, SKM.	Rp.	307.000,-
397.	Aning Kholifah	Rp.	264.300,-
398.	Hanny Kurniasih	Rp.	264.300,-
399.	Sukristyoso, Bc.Hk.	Rp.	346.800,-
400.	Misni Arwati	Rp.	250.100,-
401.	Sugiyanto (sanitasi)	Rp.	204.600,-
402.	Suroso	Rp.	264.300,-
403.	Bambang Subiyanto	Rp.	253.000,-
404.	Sri Mulyono	Rp.	224.500,-
405.	Haryani	Rp.	253.000,-
406.	Harmadi	Rp.	318.300,-
407.	Mulyanto	Rp.	309.800,-
408.	Suparman	Rp.	324.000,-
409.	Wuryanto	Rp.	224.500,-
410.	Legimin	Rp.	304.100,-
411.	Suparmi	Rp.	221.700,-
412.	Sumardi	Rp.	289.900,-
413.	Sardito	Rp.	261.500,-
414.	Sutiyono	Rp.	261.500,-
415.	Kayati	Rp.	250.100,-
416.	Ramelan	Rp.	193.300,-
417.	Hariyanti	Rp.	278.500,-
418.	Lamiyem	Rp.	216.000,-
419.	Kayat	Rp.	210.300,-
420.	Kusnadi	Rp.	244.400,-
421.	Sugeng	Rp.	216.000,-
422.	Supriyanto	Rp.	324.000,-
423.	Sugiyanto	Rp.	267.200,-
424.	Gunadi	Rp.	267.200,-
425.	Parmin	Rp.	272.900,-
426.	Mudjijanto	Rp.	187.600,-
427.	Santosa	Rp.	216.000,-

Hal. 17 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

428.	Djoko Suroso	Rp.	216.000,-
429.	R. Supirah	Rp.	216.000,-
430.	Sarwono (Bsl)	Rp.	224.500,-
431.	Dasuki	Rp.	250.100,-
432.	Dalimin	Rp.	187.600,-
433.	Purwaningsih	Rp.	250.100,-
434.	Suparno	Rp.	292.800,-
435.	Sudadi	Rp.	267.200,-
436.	Yarnan	Rp.	267.200,-
437.	Lagiyo	Rp.	221.700,-
438.	Yusuf A.S. UGD	Rp.	307.000,-
439.	Murjanta	Rp.	187.600,-
440.	Istamarwati	Rp.	362.400,-
441.	Sakirman	Rp.	201.800,-
442.	Sukardi	Rp.	179.100,-
443.	Siswanto	Rp.	179.100,-
444.	Ngarsani	Rp.	179.100,-
445.	Istiani	Rp.	164.900,-
446.	Agung Prasetyo Aji	Rp.	164.900,-
447.	Wiwit Iswadi	Rp.	164.900,-
448.	Catur Setyobudi	Rp.	164.900,-
449.	Purwanto	Rp.	164.900,-
450.	Endah Nugrahini	Rp.	164.900,-
451.	Amin Rochmadi	Rp.	164.900,-
452.	Setiawan Heri Putranto	Rp.	164.900,-
453.	Wahyu Purnami	Rp.	164.900,-
454.	Dwi Mulatiningsih	Rp.	164.900,-
455.	Astri Eko Sri Handayani	Rp.	164.900,-
456.	Nurul Fadhillah	Rp.	164.900,-
457.	Sri Nuryatmi	Rp.	164.900,-
458.	Fitriani Wulandari	Rp.	164.900,-
459.	Niniek Sulistiowati	Rp.	164.900,-
460.	Sri Mulyani	Rp.	164.900,-
461.	Khristina Andriyani	Rp.	164.900,-
462.	Sarmi Setyani	Rp.	164.900,-
463.	Yulianto Catur Nugroho	Rp.	150.600,-
464.	Sugeng	Rp.	164.900,-
465.	Pebriyanto, Amd. OT	Rp.	136.400,-
466.	Estysetyaningsih, Amd. OT	Rp.	136.400,-
467.	Sri Mulyani	Rp.	136.400,-
468.	Tri Maryanto	Rp.	136.400,-
469.	Tutik Sripartini	Rp.	136.400,-
470.	Puryanto	Rp.	136.400,-
471.	Triyanto	Rp.	136.400,-
472.	Ratih Rahmawati	Rp.	136.400,-
473.	Rekno Widayati	Rp.	136.400,-
474.	Joko Purnomo	Rp.	136.400,-
475.	Dina Risnawati	Rp.	136.400,-
476.	Rangga Chrisnawati	Rp.	136.400,-
477.	Jumali	Rp.	136.400,-
478.	Betzeda Dewi W.	Rp.	136.400,-
479.	Windardi	Rp.	136.400,-
480.	Ninik Sulistyaningsih	Rp.	136.400,-
481.	Sriyono	Rp.	136.400,-
482.	Agung Susilo	Rp.	136.400,-
483.	Joko Ontoro	Rp.	136.400,-
484.	Agus Hartanto	Rp.	136.400,-
485.	Eko Budiyo	Rp.	136.400,-
486.	Wisnu Trilaksono	Rp.	136.400,-
487.	Muh. Iswahyu Handoyo	Rp.	136.400,-
488.	Budiyo	Rp.	136.400,-
489.	Fajar Syaifudin	Rp.	136.400,-
490.	Abdul Bashir	Rp.	136.400,-
491.	Sonny Shyndoro S.	Rp.	136.400,-
492.	Sri Winastuti	Rp.	136.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

493.	Zeeky Oktavianto	Rp.	136.400,-
494.	Hendri Santoso	Rp.	136.400,-
495.	Nurwantini	Rp.	136.400,-
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)			
496.	dr. Agung Priatmaja	Rp.	505.900,-
497.	Mamik Puspasari, S.Kep.	Rp.	352.400,-
498.	Sulistiyaningsih, S.Kep.	Rp.	352.400,-
499.	Hartini, Amd. Gizi	Rp.	301.300,-
500.	Mohamad Al Amin, Amk.	Rp.	272.900,-
501.	Joni Raharjo, Amk.	Rp.	272.900,-
502.	Wahyu Widiyanti, Amk.	Rp.	272.900,-
503.	Tri Andri Pujianti, Amk.	Rp.	272.900,-
504.	Apriyanto Ari Setiyawan, Amk.	Rp.	272.900,-
505.	Asih Sudaryanto, Amk.	Rp.	272.900,-
506.	Suwito, Amk.	Rp.	301.300,-
507.	Setya Ari Bawanti	Rp.	307.000,-

Kemudian dana sebesar Rp. 495.820.495,- (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) atas memo atau surat dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj. tanggal 17 Juli 2006, uang tersebut pada tanggal 27 Juli 2006 dibagikan lagi ke seluruh Pegawai RSJD Surakarta termasuk pensiunan Pegawai RSUD Surakarta. Disamping dari uang Rp. 495.820.495,- (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dicampur dengan uang Jasa Pelayanan Rutin bulan Juni 2006 sebesar Rp. 177.280.798,- (seratus tujuh puluh puluh juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO.	N A M A	PENERIMAAN BERSIH
	DIREKTUR	
1.	dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj.	Rp. 14.475.700,-
	WAKIL DIREKTUR	
2.	dr. Dwi Priyo Hartono, Sp.Kj.	Rp. 9.650.500,-
3.	dr. H. Sigit Wahyu Purnomo, Sp.Kj.	Rp. 9.650.500,-
	KABAG & KABID	
4.	Drs. Joko Supomo	Rp. 4.825.200,-
5.	Dra. Sutarmi, Apt.	Rp. 4.825.200,-
6.	Suranto, AMK.	Rp. 4.825.200,-
7.	dr. Ita	Rp. 4.825.200,-
	KA.SUBAG & KA.SIE	
8.	Slamet, SH.M.Hum.	Rp. 3.618.900,-
9.	Drs. Bambang Supriyono	Rp. 3.618.900,-
10.	Drs. Slamet Budi Prasetyo	Rp. 3.618.900,-
11.	Pribadi Suharjo, BA.	Rp. 3.618.900,-
12.	Yuliati, SH.	Rp. 3.618.900,-
13.	Harjono, AMK.	Rp. 3.618.900,-
14.	Dra. Sri Wahyuni, Apt.	Rp. 3.618.900,-
15.	Sri Wiyani, SMPH.SKM	Rp. 3.618.900,-

Hal. 19 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Yetty Mulyati	Rp. 3.618.900,-
17.	Bagus Alit Putra, SKM	Rp. 3.618.900,-
18.	Sri Indari, AMK.	Rp. 3.618.900,-
19.	Endang Setyaningsih	Rp. 3.618.900,-
20.	Sukardi, S.Kp.	Rp. 3.618.900,-
PSIKIATER		
21.	dr. Hendrina A. Kuhuwael, Sp.Kj.	Rp. 2.801.600,-
22.	dr. Rahayu Budi Mulyanto, Sp.Kj.	Rp. 2.801.600,-
DOKTER UMUM		
23.	dr. Bambang Hirjanto	Rp. 2.405.200,-
24.	dr. Wibowo	Rp. 2.304.200,-
25.	dr. Rukma Astuti	Rp. 2.304.200,-
26.	dr. Heniwati	Rp. 2.446.300,-
27.	dr. H. Amsal, AM.MHA.	Rp. 2.507.200,-
28.	dr. Setyowati Raharjo	Rp. 2.121.500,-
29.	dr. Rino Pratondo Adji	Rp. 2.101.200,-
30.	dr. Fitra Primanditha	Rp. 2.101.200,-
DOKTER HARLEP		
31.	dr. Hasanudin	Rp. 1.242.400,-
32.	dr. Safrudin	Rp. 1.242.400,-
33.	dr. Adriesta Herdaetha	Rp. 1.242.400,-
DOKTER GIGI		
34.	drg. Noviasari SS.	Rp. 1.928.600,-
PSIKOLOG		
35.	Dra. Sri Karmini	Rp. 2.070.700,-
36.	Dra. Endang Suparti SS.	Rp. 1.806.800,-
37.	Dra. M.M. Indah Sundari	Rp. 1.969.200,-
38.	Dra. Sepi Indriyati	Rp. 1.725.600,-
39.	Miratun Hasanah, S.Psi.	Rp. 1.624.100,-
40.	Ismiyati Yuliatun, S.Psi.	Rp. 1.603.800,-
41.	Drs. Partana, Apt.	Rp. 2.070.700,-
42.	Dra. Trihidayati, Apt.	Rp. 1.745.900,-
43.	drg. Budiyanto	Rp. 1.888.000,-
KA. BANGSAL		
44.	Yati Suryati	Rp. 1.745.900,-
45.	Sri Muljanti	Rp. 1.725.600,-
46.	Suyoko	Rp. 1.664.700,-
47.	Agus Sutoko	Rp. 1.644.400,-
48.	Lukas Mudjijono	Rp. 1.421.100,-
49.	Anik Sundari	Rp. 1.665.000,-
50.	Warno, Skep.	Rp. 1.664.700,-
51.	Sa'adah	Rp. 1.624.100,-
52.	Ni Wayan Margitri	Rp. 1.827.100,-
53.	Ruth Herawati	Rp. 1.745.900,-
54.	Okawati Herni Saefutri, S.Kep.	Rp. 1.888.000,-
55.	Sudarni	Rp. 1.766.200,-
56.	Untung Saifurahmawan	Rp. 1.441.400,-
57.	Drs. Supriyono	Rp. 2.070.700,-
STAFF UPF		
58.	Purwanto	Rp. 1.400.800,-
59.	Kusuma Wardani	Rp. 1.380.500,-
60.	Hadi Yuwono	Rp. 1.725.600,-
61.	Agus Suharyanto	Rp. 1.177.500,-
PERAWAT DAN PP		
62.	Eko Sunaryanti	Rp. 1.279.000,-
63.	Emy Farida Indriawati	Rp. 776.500,-
64.	Siti Musyarifah	Rp. 1.258.700,-
65.	Siti Puji Mulyani	Rp. 897.300,-
66.	Titik Supriyati	Rp. 974.500,-
67.	Sulami	Rp. 690.200,-
68.	Sutanti	Rp. 742.000,-
69.	Dyah Suprihatin	Rp. 638.500,-
70.	Suci Sarkawini	Rp. 724.800,-
71.	Arum Aryandari, Skep.	Rp. 1.157.200,-
72.	Yulius Kriswanto, Skep.	Rp. 1.258.700,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.	Nuning Purwanti	Rp. 1.299.300,-
74.	Rita Tri Soebekti, Skep.	Rp. 1.218.100,-
75.	Sumarti	Rp. 767.900,-
76.	Sri Suparti	Rp. 828.300,-
77.	Sunarwi	Rp. 845.500,-
78.	Agnes Giyarni	Rp. 811.000,-
	PERAWAT	
79.	Lilia Dwi Pujiastuti	Rp. 1.339.900,-
80.	Sri Sutarmi	Rp. 1.441.400,-
81.	Mardi Utomo	Rp. 1.319.600,-
82.	Budiyono	Rp. 1.319.600,-
83.	Rini Sunaryati	Rp. 1.339.900,-
84.	Timin	Rp. 1.035.400,-
85.	Tri Wahyudiyanto	Rp. 931.800,-
86.	Sugiyono	Rp. 931.800,-
87.	R. Agus Mardianto	Rp. 931.800,-
88.	Sri Pujiati	Rp. 1.299.300,-
	PEKARYA PERAWATAN	
89.	Kushartono	Rp. 1.197.800,-
90.	Suldi	Rp. 1.096.300,-
91.	Sri Riyani	Rp. 1.248.500,-
92.	Tri Winarni	Rp. 802.400,-
93.	Maskuri (UGD)	Rp. 975.000,-
94.	Sumiyanah	Rp. 802.400,-
95.	Suratno UGD	Rp. 1.018.100,-
96.	Winarno	Rp. 933.900,-
97.	Sutrisna	Rp. 1.167.300,-
98.	Sri Mulyani	Rp. 1.015.100,-
99.	Sumardi REHAB	Rp. 1.096.300,-
100.	Sumiyarsana	Rp. 1.197.800,-
101.	Ratno	Rp. 1.147.000,-
102.	Paiman	Rp. 1.218.100,-
103.	Mulyono	Rp. 897.300,-
104.	Marimin	Rp. 742.000,-
105.	Warsito	Rp. 742.000,-
106.	Wardani	Rp. 742.000,-
107.	Subari	Rp. 673.000,-
108.	Sugiyanti	Rp. 845.500,-
	PERAWAT	
109.	Mudjito	Rp. 1.380.500,-
110.	Fatoni	Rp. 1.360.200,-
111.	Widodo	Rp. 1.218.100,-
112.	Slamet Riyadi	Rp. 1.238.400,-
113.	Inalisa Mudono	Rp. 1.319.600,-
114.	Siti Taslimah	Rp. 1.339.900,-
115.	M. Mispan	Rp. 1.319.600,-
116.	Jaka Mursito	Rp. 1.319.600,-
117.	Supriyanto	Rp. 1.644.400,-
118.	Nurwindyah Widiningsih	Rp. 1.218.100,-
119.	Sri Haryati	Rp. 1.400.800,-
120.	Ni Ketut Mudiari	Rp. 1.319.600,-
121.	Suranto	Rp. 1.238.400,-
122.	Sri Winarti	Rp. 1.096.300,-
123.	Arman Susanto	Rp. 1.177.500,-
124.	Irwan Heru Priyanto	Rp. 1.177.500,-
125.	Mardini, Skep	Rp. 1.806.800,-
126.	Sugiyana	Rp. 1.177.500,-
127.	Kustini	Rp. 1.238.400,-
128.	Siti Nurchaeni	Rp. 1.258.700,-
129.	Andi Nugroho	Rp. 1.018.100,-
130.	Muhammad Z.A.	Rp. 931.800,-
131.	Joko Sri Pujianto, S.Kep.	Rp. 1.258.700,-
132.	Imam Rifai	Rp. 1.258.700,-
133.	Muhammad Sukandar	Rp. 1.157.200,-
134.	Ahmad Rafiq Muhajir	Rp. 1.258.700,-

Hal. 21 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.	Yuli M. Kartiko	Rp. 931.800,-
136.	Setyo Priyono	Rp. 1.018.100,-
137.	Ahmad Su'ib	Rp. 931.800,-
138.	Sumianto	Rp. 1.000.000,-
139.	Paridi	Rp. 880.100,-
140.	Mujiyono, S.Kep.	Rp. 1.218.100,-
141.	Edy Wiyono	Rp. 914.600,-
142.	Sri Rahayu	Rp. 767.900,-
143.	Nunuk Sri Sejatiningasih	Rp. 914.600,-
144.	Heru Sriyanto, Amk.	Rp. 914.600,-
145.	Tri Setya Budiyanita, Amk.	Rp. 828.300,-
146.	Sri Mulyani, Amk.	Rp. 828.300,-
147.	Yunita Widyastuti, Amk.	Rp. 828.300,-
148.	Joko Kuncoro	Rp. 880.100,-
149.	Afik Driyanto, S.Kep.	Rp. 1.319.600,-
150.	Adi Dwi Priyanto Purnomo	Rp. 914.600,-
151.	Agus Sriyanto	Rp. 966.300,-
152.	Heru Sapto Budiyanto, S.Kep.	Rp. 1.319.600,-
153.	Pupus Risnawati	Rp. 880.100,-
154.	Lilik Sri Wahyuni	Rp. 966.300,-
155.	Yuli Sumarni	Rp. 880.100,-
156.	Milan Rahmawati	Rp. 845.500,-
157.	Riyati	Rp. 759.300,-
158.	Ariyani	Rp. 845.000,-
159.	Yuli Purwaningsih	Rp. 836.500,-
160.	Sri Rahayu	Rp. 724.800,-
161.	Sulistiyowatik	Rp. 645.500,-
162.	Pudji Lestari	Rp. 880.100,-
163.	Djoko Witoyo	Rp. 845.500,-
164.	Eko Budi Raharjo	Rp. 845.500,-
165.	Supriono	Rp. 845.500,-
166.	Puji Rahayu	Rp. 759.300,-
167.	Suwito	Rp. 759.300,-
168.	Dwi Sri Hartanti	Rp. 845.500,-
169.	Suparmi	Rp. 724.800,-
170.	Yenita Antonio	Rp. 845.500,-
171.	Yuni Widayanti	Rp. 845.500,-
172.	Hidayat	Rp. 759.300,-
173.	Supriyanto	Rp. 724.800,-
174.	Kusumastuti Retno	Rp. 828.300,-
175.	Sri Handayani	Rp. 828.300,-
176.	Ita Agustina	Rp. 793.800,-
177.	Luluk Purnomo	Rp. 707.500,-
178.	Bagyo	Rp. 793.800,-
179.	Titin Trinawan	Rp. 673.000,-
PEKARYA PERAWATAN		
180.	Sri Subagiyo UP	Rp. 1.055.700,-
181.	F.X. Edy Sutikno	Rp. 994.800,-
182.	Priyanto	Rp. 994.800,-
183.	Madyo Wilopo	Rp. 1.045.500,-
184.	Sutirah	Rp. 845.500,-
185.	Sardjiman	Rp. 767.900,-
186.	Triyatno	Rp. 819.700,-
187.	Kasimin	Rp. 862.800,-
188.	Purwanto	Rp. 975.000,-
189.	Wiyono	Rp. 828.300,-
190.	Suradji	Rp. 776.500,-
191.	Suparno Rubiyanto	Rp. 776.500,-
192.	Suyati	Rp. 940.500,-
193.	Agus Sriyanto	Rp. 940.500,-
194.	Suparto	Rp. 767.900,-
195.	Riyanto	Rp. 767.900,-
196.	Suparno	Rp. 897.300,-
197.	Supadno	Rp. 854.200,-
198.	Mardiyatmi	Rp. 767.900,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199.	Joko Triyono	Rp.	836.900,-
200.	Sumardjo	Rp.	914.600,-
201.	Murpiati	Rp.	880.100,-
202.	Sugiatmi	Rp.	811.000,-
203.	Jasmiko	Rp.	224.300,-
204.	Sulastri	Rp.	673.000,-
205.	Ngadino	Rp.	586.700,-
206.	Sri Sunarni	Rp.	690.200,-
207.	Suparman	Rp.	655.700,-
208.	Mujiyo	Rp.	733.400,-
209.	Sumarso	Rp.	862.800,-
210.	Suparna	Rp.	862.800,-
211.	Sukarman	Rp.	724.800,-
212.	Totok Sutarno	Rp.	681.600,-
213.	Suharni	Rp.	661.600,-
214.	Sutarja	Rp.	698.900,-
215.	Sumardi, Adm.Fis.	Rp.	655.700,-
216.	Parno GIZI	Rp.	828.300,-
217.	Surahmi	Rp.	724.800,-
218.	Paidi	Rp.	681.600,-
219.	Sudinaryo	Rp.	724.800,-
220.	S. Sri Soetarmini	Rp.	759.300,-
221.	Intiyartini	Rp.	638.500,-
222.	Sunarto	Rp.	698.900,-
223.	Slamet Suryadi	Rp.	638.500,-
224.	Hartoyo GIZI	Rp.	811.000,-
225.	Edy Rahmadi GIZI	Rp.	931.800,-
PARAMEDIS NON PERAWATA N			
226.	Endang Rochini	Rp.	1.309.400,-
227.	Kade Fini Irawati	Rp.	1.583.500,-
228.	Suyono	Rp.	1.055.700,-
229.	Heru Kriswanto	Rp.	1.106.400,-
230.	Darmawan Jufri	Rp.	1.207.900,-
231.	Woro Kamarina	Rp.	1.664.700,-
232.	Jumadil Rosta	Rp.	1.207.900,-
233.	Ngatmiyatun	Rp.	1.086.100,-
234.	Ririn Ernawati	Rp.	1.289.100,-
235.	Puji Hartati SKM	Rp.	1.177.500,-
236.	Naryo	Rp.	836.900,-
237.	Madyo Utoro	Rp.	681.600,-
238.	E. Bkti Susi Utami	Rp.	836.900,-
239.	Teguh Broto HS.	Rp.	836.900,-
240.	Aris Wibowo, ST.	Rp.	1.177.500,-
241.	Endah Sri Suharti	Rp.	1.126.700,-
242.	Dwi Harimurti	Rp.	1.329.700,-
243.	Sri Parwijati	Rp.	1.126.700,-
244.	Suhadi	Rp.	1.065.800,-
245.	Dewi Purnamaningsih	Rp.	1.025.200,-
246.	Parniati	Rp.	819.700,-
247.	Achmad Zaenuri	Rp.	905.900,-
248.	Edi Purwanto	Rp.	1.061.300,-
249.	Joko Ariyanto	Rp.	802.400,-
250.	Irma Rachmawati	Rp.	785.200,-
251.	Mohamad Pujiarso	Rp.	785.200,-
REHABILITASI			
252.	Sri Redjeki	Rp.	1.035.400,-
253.	Sri Supartini	Rp.	1.076.000,-
254.	Sulasono	Rp.	1.380.500,-
255.	Purwanto	Rp.	1.076.000,-
256.	Tri Riyatni R. Parwati	Rp.	994.800,-
257.	Kadarisman	Rp.	1.076.000,-
258.	G. Krisnawati (Wisanggeni)	Rp.	1.177.500,-
259.	Srijadi	Rp.	994.800,-

Hal. 23 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260.	Sardi	Rp. 1.035.400,-
261.	Agus Suroyo	Rp. 1.045.500,-
262.	Anton Gunawan (Staf UGD)	Rp. 1.197.800,-
263.	Dalima	Rp. 845.500,-
264.	Tabah Suprapti	Rp. 776.500,-
265.	Retno Maruti	Rp. 759.300,-
266.	Sri Suharsi	Rp. 994.800,-
267.	Ngadiman (SENA)	Rp. 655.700,-
268.	Budi Prasadja	Rp. 655.700,-
269.	Kadi Riyanto	Rp. 673.000,-
270.	Arini Kurniati	Rp. 1.015.100,-
JASA KONSULTASI KHUSUS		
271.	dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj.	Rp. 90.868.672,-
272.	dr. Hendrina A. Kuhuwael, Sp.Kj.	-
273.	dr. Sigit Wahyu Purnomo, Sp.Kj.	Rp. 10.096.510,-
274.	dr. Dwi Priyo Hartono, Sp.Kj.	-
275.	dr. Bambang Hirjanto	-
276.	dr. Heniwati	-
277.	dr. Rukma Astuti	-
278.	dr. Dwi Priyo Hartono, Sp.Kj.	-
279.	dr. Ita	-
280.	drg. Budiyanto	-
281.	dr. Setyowati	-
282.	Drs. Partana, Apt.	-
283.	Ida Bagus Alit Putra, Amk.	-
284.	Dra. Dwi Faridayanti	-
285.	Dra. Sri Karmini	-
286.	Kade Fini Irawati	-
287.	dr. H. Amsal AM., MHA.	-
288.	dr. Rino Pratondo Adji	-
289.	dr. Fitra Primanditha	-
290.	dr. Agung	-
291.	dr. Rahayu Budi Mulyanto, Sp.Kj.	-
DOKTER JAGA		
292.	dr. Etha	-
293.	dr. Rino	-
294.	dr. Agung P.	-
295.	dr. Hasanudin	-
296.	dr. Sumarji	-
297.	dr. Nugraheni	-
298.	dr. Safrudin	-
PELAYANAN ADMINISTRASI		
299.	Basuki Murlijanto	Rp. 1.309.400,-
300.	Drs. Sri Munir	Rp. 1.786.500,-
301.	Drs. Munawir	Rp. 1.542.900,-
302.	Dra. Dwi Faridayanti	Rp. 1.888.000,-
303.	Dra. C. Anik Irawati	Rp. 1.786.500,-
304.	Dra. ME. Kusdyah SW.	Rp. 2.294.000,-
305.	Drs. Sarjana	Rp. 1.502.300,-
306.	Sumina, SIP.	Rp. 1.542.900,-
307.	Dra. Dyah Sri Marwati	Rp. 1.664.700,-
308.	Setya Budi Harsana, SE.	Rp. 1.309.400,-
309.	Sudiyanto, Bsc.	Rp. 1.461.700,-
310.	Soewardji	Rp. 1.116.600,-
311.	Retno Suryaningsih	Rp. 1.106.400,-
312.	Adi Sunarto	Rp. 1.106.400,-
313.	Suyatno	Rp. 1.177.500,-
314.	Sumarni M.	Rp. 1.136.900,-
315.	Pujiyani	Rp. 1.126.700,-
316.	T.W. Djoko Suminar	Rp. 1.258.700,-
317.	Giyono	Rp. 1.319.600,-
318.	Suharno	Rp. 1.116.600,-
319.	Sri Giyanto	Rp. 1.116.600,-
320.	Sri Waliyanti	Rp. 1.197.800,-
321.	Raden Hery Sutanto	Rp. 1.603.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322.	Dayaningsih	Rp. 1.644.400,-
323.	Hari Waskitaningsih, SE.	Rp. 1.451.500,-
324.	Ujiyanti	Rp. 994.800,-
325.	Agnes Widayani S.	Rp. 1.096.300,-
326.	Kusuma Dwi Wardani	Rp. 1.603.800,-
327.	Tri Kusdiati	Rp. 1.116.600,-
328.	Sri Ajeng Winarni	Rp. 1.096.300,-
329.	A. Sugeng Haryanto	Rp. 1.136.000,-
330.	Tangkasati	Rp. 994.800,-
331.	Johanes Suharno	Rp. 2.009.800,-
332.	Ratsrini	Rp. 1.096.300,-
333.	Siti Kustiyah	Rp. 994.800,-
334.	Mrajak	Rp. 1.197.800,-
335.	Sutadi	Rp. 1.299.300,-
336.	Witarso	Rp. 1.096.300,-
337.	Pudyastuti	Rp. 1.136.900,-
338.	Sektiono	Rp. 2.009.800,-
339.	Apsari Dwi Martini, S.Sos.	Rp. 1.339.900,-
340.	Purwanto	Rp. 1.096.300,-
341.	Sussi Sukarangesti	Rp. 1.197.800,-
342.	Siti Suryani	Rp. 1.197.800,-
343.	Sucipto	Rp. 1.400.800,-
344.	Sri Widodo	Rp. 994.800,-
345.	Widartining	Rp. 1.197.800,-
346.	Edy Supriyanti, SE.	Rp. 1.451.500,-
347.	Yohana Dwi Listiyani	Rp. 1.096.300,-
348.	Wisnu Setyo Budi	Rp. 1.035.400,-
349.	Subur Iriyanto	Rp. 1.197.800,-
350.	Sri Handayani	Rp. 1.908.300,-
351.	Dwi Fitriyanto	Rp. 1.603.800,-
352.	Winarsi	Rp. 1.909.511,-
353.	Sri Sunarni	Rp. 994.800,-
354.	Surti Winarni	Rp. 1.096.300,-
355.	Bima Widiagung	Rp. 1.603.800,-
356.	Antonius Kusumastoyo	Rp. 994.800,-
357.	Harijono	Rp. 1.096.300,-
358.	Kukuh Suwito	Rp. 1.603.800,-
359.	Giati Triyanie	Rp. 1.147.000,-
360.	Ning Haryuningsih	Rp. 1.096.300,-
361.	Sularni	Rp. 1.197.800,-
362.	Sunaryo B.	Rp. 994.800,-
363.	Ratih	Rp. 1.096.300,-
364.	Sri Mujiyati	Rp. 1.096.300,-
365.	Mulati	Rp. 994.800,-
366.	Tatik Saparini (rehab)	Rp. 1.096.300,-
367.	Isni Yunaity	Rp. 1.096.300,-
368.	Joko Hudi Rohmad	Rp. 1.705.300,-
369.	Sri Haryani	Rp. 1.076.000,-
370.	Joko Dalmadi	Rp. 1.177.500,-
371.	Sutiarsi	Rp. 1.076.000,-
372.	Sumardi	Rp. 1.076.000,-
373.	F.X. Bambang Soesilo	Rp. 954.200,-
374.	Adi Sunarno	Rp. 974.500,-
375.	Hartono Narodoseno (I. Farmasi)	Rp. 1.076.000,-
376.	Widati	Rp. 1.197.800,-
377.	Suroso	Rp. 994.800,-
378.	Meilatul Basukiningsih	Rp. 1.603.800,-
379.	Suratna	Rp. 1.177.500,-
380.	Marmadi	Rp. 1.035.400,-
381.	Djoko Utomo	Rp. 994.800,-
382.	Nur Rosyid	Rp. 1.685.000,-
383.	Subroto, Bc.Hk.	Rp. 1.096.300,-
384.	Rukiman	Rp. 1.055.700,-
385.	Untari	Rp. 1.035.400,-
386.	Marjoko	Rp. 793.800,-

Hal. 25 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

387.	Sriyanto, S.Sos.	Rp. 1.329.700,-
388.	Dul Qodir	Rp. 1.138.900,-
389.	Kiyatno, SE.	Rp. 1.035.400,-
390.	Siti Aisyah	Rp. 1.350.000,-
391.	Paryanto	Rp. 862.800,-
392.	Mujiono	Rp. 1.294.200,-
393.	Mulyono	Rp. 802.400,-
394.	Rantono	Rp. 690.200,-
395.	Totok Hardiyanto, SKM.	Rp. 931.800,-
396.	Aning Kholifah	Rp. 802.400,-
397.	Hanny Kurniasih	Rp. 802.400,-
398.	Sukristyoso, Bc.Hk.	Rp. 1.238.400,-
400.	Misni Arwati	Rp. 759.300,-
400.	Sugiyanto (sanitasi)	Rp. 621.200,-
401.	Rubaliyati	Rp. 940.500,-
402.	Suroso	Rp. 802.400,-
403.	Bambang Subiyanto	Rp. 767.900,-
404.	Sri Mulyono	Rp. 681.600,-
405.	Haryani	Rp. 767.600,-
406.	Harmadi	Rp. 966.300,-
407.	Mulyanto	Rp. 940.500,-
408.	Suparman	Rp. 983.600,-
409.	Wuryanto	Rp. 681.600,-
410.	Legimin	Rp. 923.200,-
411.	Prasetyaningsih Nuraini	Rp. 215.700,-
412.	Suparmi	Rp. 673.000,-
413.	Sumardi	Rp. 880.100,-
414.	Sardito	Rp. 793.800,-
415.	Sutiyono	Rp. 793.800,-
416.	Kayati	Rp. 759.300,-
417.	Ramelan	Rp. 586.700,-
418.	Hariyanti	Rp. 845.500,-
419.	Lamiyem	Rp. 655.700,-
420.	Kayat	Rp. 638.500,-
421.	Kusnadi	Rp. 742.000,-
422.	Sugeng	Rp. 655.700,-
423.	Supriyanto	Rp. 983.600,-
424.	Sugiyanto	Rp. 811.000,-
425.	Gunadi	Rp. 811.000,-
426.	Parmin	Rp. 828.300,-
427.	Mudjijanto	Rp. 569.500,-
428.	Santosa	Rp. 655.700,-
429.	Djoko Suroso	Rp. 655.700,-
430.	R. Supirah	Rp. 655.700,-
431.	Sarwono (Bsl)	Rp. 681.600,-
432.	Dasuki	Rp. 759.300,-
433.	Dalimin	Rp. 569.500,-
434.	Purwaningsih	Rp. 759.300,-
435.	Suparno	Rp. 888.700,-
436.	Sudadi	Rp. 811.000,-
437.	Yarngan	Rp. 811.000,-
438.	Lagiyo	Rp. 673.000,-
439.	Yusuf A.S. UGD	Rp. 931.800,-
440.	Murjanta	Rp. 569.500,-
441.	Istamarwati	Rp. 1.069.900,-
442.	Sakirman	Rp. 612.600,-
443.	Sukardi	Rp. 543.600,-
444.	Siswanto	Rp. 543.600,-
445.	Ngarsani	Rp. 543.600,-
446.	Istiani	Rp. 500.400,-
447.	Agung Prasetyo Aji	Rp. 500.400,-
448.	Wiwit Iswadi	Rp. 500.400,-
449.	Catur Setyobudi	Rp. 500.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.	Purwanto	Rp.	500.400,-
451.	Endah Nugrahini	Rp.	500.400,-
452.	Amin Rochmadi	Rp.	500.400,-
453.	Setiawan Heri Putranto	Rp.	500.400,-
454.	Wahyu Purnami	Rp.	500.400,-
455.	Dwi Mulatiningsih	Rp.	500.400,-
456.	Astri Eko Sri Handayani	Rp.	500.400,-
457.	Nurul Fadhilah	Rp.	500.400,-
458.	Sri Nuryatmi	Rp.	500.400,-
459.	Fitriani Wulandari	Rp.	500.400,-
460.	Niniek Sulistiowati	Rp.	500.400,-
461.	Sri Mulyani	Rp.	500.400,-
462.	Khristina Andriyani	Rp.	500.400,-
463.	Sami Setyani	Rp.	500.400,-
464.	Yulianto Catur Nugroho	Rp.	457.300,-
465.	Sugeng	Rp.	500.400,-
466.	Pebriyanto, Amd. OT	Rp.	414.100,-
467.	Estysetyaningsih, Amd. OT	Rp.	414.100,-
468.	Sri Mulyani	Rp.	414.100,-
469.	Tri Maryanto	Rp.	414.100,-
470.	Tutik Sripartini	Rp.	414.100,-
471.	Puryanto	Rp.	414.100,-
472.	Triyanto	Rp.	414.100,-
473.	Ratih Rahmawati	Rp.	414.100,-
474.	Rekno Widayati	Rp.	414.100,-
475.	Joko Purnomo	Rp.	414.100,-
476.	Dina Risnawati	Rp.	414.100,-
477.	Rangga Chrisnawati	Rp.	414.100,-
478.	Jumali	Rp.	414.100,-
479.	Betzeda Dewi W.	Rp.	414.100,-
480.	Windardi	Rp.	414.100,-
481.	Ninik Sulistyaningsih	Rp.	414.100,-
482.	Sriyono	Rp.	414.100,-
483.	Agung Susilo	Rp.	414.100,-
484.	Joko Untoro	Rp.	414.100,-
485.	Agus Hartanto	Rp.	414.100,-
486.	Eko Budiyanto	Rp.	414.100,-
487.	Wisnu Trilaksono	Rp.	414.100,-
488.	Muh. Iswahyu Handoyo	Rp.	414.100,-
489.	Budiyono	Rp.	414.100,-
490.	Fajar Syaifudin	Rp.	414.100,-
491.	Abdul Bashir	Rp.	414.100,-
492.	Sonny Shyndoro S.	Rp.	414.100,-
493.	Sri Winastuti	Rp.	414.100,-
494.	Zeeky Oktavianto	Rp.	414.100,-
495.	Hendri Santoso	Rp.	414.100,-
496.	Nurwantini	Rp.	414.100,-
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)			
497.	dr. Agung Priatmaja	Rp.	1.806.800,-
498.	Mamik Puspasari, S.Kep.	Rp.	1.258.700,-
499.	Sulistiyaningsih, S.Kep.	Rp.	1.258.700,-
500.	Hartini, Amd. Gizi	Rp.	914.700,-
501.	Mohamad Al Amin, Amk.	Rp.	828.300,-
502.	Joni Raharjo, Amk.	Rp.	828.300,-
503.	Wahyu Widiyanti, Amk.	Rp.	828.300,-
504.	Tri Andri Pujiyanti, Amk.	Rp.	828.300,-
505.	Apriyanto Ari Setiawan, Amk.	Rp.	828.300,-
506.	Asih Sudaryanto, Amk.	Rp.	828.300,-
507.	Suwito, Amk.	Rp.	914.600,-
508.	Setya Ari Bawanti	Rp.	639.500,-

Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar

Hal. 27 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 673.101.293,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sesuai Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK RI Nomor : 23/S/II- X/08/2007 tertanggal 07 Agustus 2007 atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN selaku Ymt Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta berdasarkan Surat Penugasan Direktur Rumah Sakit Jiwa Surakarta Nomor : KP.00.03.2563 tanggal 18 Desember 2004 secara bersama- sama atau bertindak sendiri- sendiri dengan dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj, dr. Rukma Astuti dan dr. Hendrina A.K., Sp.Kj. (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2005 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2006 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Jalan Ki Hajar Dewantoro XII Jebres Surakarta atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
Bermula dari adanya surat Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Nomor : PR.03.02.1.1.4060 tertanggal 16 September 2005 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Isian Form Verifikasi RS/BP4/BKMM yang salah satu itemnya berupa daftar isian pengajuan dana penggantian defisit Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang Kesehatan Tahun 2004 yang ditujukan kepada pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta. Atas surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Medik DEPKES RI tersebut, meskipun di RSJD Surakarta tidak mengalami defisit dalam pengelolaan dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM Bid Kes) tetapi Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN selaku Ymt Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang memiliki dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam SK Menteri Kesehatan RI Nomor : 135/MENKES/SK/IV/78 tanggal 28 April 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) SK Menteri Kesehatan tersebut yaitu Tugas Wakil Direktur adalah di Bidang Pengawasan dan Koordinasi yang selanjutnya ditetapkan oleh Direktur, tugas pokok dan fungsi selaku YMT Wadir Umum dan Keuangan RSJD Surakarta sebagaimana diatur Pedoman Penyusunan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Pemerintah dari Direktorat Kesehatan Jiwa pada Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI di Jakarta tahun 1993 adalah sebagaimana diatur dalam BAB III Jabaran Kerja Wakil Direktur Umum yaitu bertugas : Dibidang Pengawasan dan Koordinasi yang selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Fungsi Wakil Direktur Umum adalah : melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan tugas : Kepala Bagian Sekretariat, Kepala Bidang Penunjang Medik, Kepala Instalasi Apotik, Kepala Instalasi Laboratorium, Kepala Instalasi Gizi, Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;

Adapun uraian tugas disebutkan :

Koordinasi

Hal. 29 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap Perencanaan :

Menilai dan menyerasikan rencana kebutuhan dan kegiatan dari Pimpinan Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;

Mengkordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan kegiatan dari Pimpinan Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;

Melaporkan rencana kebutuhan dan kegiatan dari Pimpinan/Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya kepada Direktur ;

Tahap pelaksanaan :

Memantau pelaksanaan kegiatan dari Pimpinan Satuan Kerja yang berada didalam koordinasinya ;

Membimbing dan melakukan motivasi atas pelaksanaan kegiatan dari Pimpinan Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;

Menggerakkan pelaksanaan disiplin pegawai dari satuan kerja di dalam koordinasinya ;

Memantau administrasi Diktat di Rumah Sakit ;

Tahap Evaluasi dan Pelaporan :

Meneliti dan mengevaluasi semua laporan kegiatan dari Pimpinan Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;

Menyusun laporan evaluasi semua kegiatan dari Pimpinan/Satuan Kerja di dalam koordinasinya ;

Pengawasan :

Tahap Perencanaan :

Memantau dan menilai pelaksanaan prosedur dan mekanisme perencanaan dari Pimpinan Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;

Tahap Pelaksanaan :

Memantau pelaksanaan kegiatan dari Pimpinan Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;

Tahap Evaluasi dan Pelaporan :

Meneliti dan mengevaluasi semua laporan kegiatan dari pimpinan/satuan kerja di dalam koordinasinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyusun laporan evaluasi semua kegiatan dari Pimpinan/Satuan Kerja di dalam koordinasinya ;
Sebagai Ketua Tim Pemeriksaan Intern Uang/Barang ;
Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan disiplin pegawai, serta memberikan bahan penilaian untuk pengisian DP3 oleh Pimpinan/Satuan Kerja di dalam koordinasinya kepada Direktur ;

WEWENANG :

Menilai rencana kebutuhan/kegiatan dari Pimpinan/Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;
Mengarahkan pelaksanaan kegiatan dari Pimpinan/Satuan Kerja di dalam koordinasinya ;
Memberikan pertimbangan kepada Direktur yang berkaitan dengan mutasi, penempatan, cuti, sanksi, promosi, dan penghargaan dari Pimpinan Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;

TANGGUNG JAWAB :

Keserasian rencana kebutuhan dan kegiatan dari Pimpinan/Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;
Kelancaran prosedur pelaksanaan kegiatan dari Pimpinan/Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;
Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari Pimpinan/Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya ;
Kebenaran hasil kerja Tim Pemeriksaan Intern uang dan barang ;
Upaya penegakan disiplin pegawai dari Pimpinan/Satuan Kerja yang berada di dalam koordinasinya dan atas kebenaran bahan penilaian untuk pengisian DP3 dari Pimpinan/Satuan Kerja tersebut ;
Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya ;
Serta memiliki tugas pokok dan fungsi selaku YMT Wadir Umum dan Keuangan RSJD Surakarta sebagaimana diatur

Hal. 31 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keputusan Direktur RSJP Surakarta Nomor : KP.01.02.1376 tanggal 20 Agustus 1997 tentang Pendelegasian Wewenang adalah sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Direktur RSJP Surakarta yaitu :

Menghadiri rapat-rapat dinas ;

Melakukan pengaturan, koordinasi dan pengawasan serta pengambilan langkah/tindakan yang dianggap perlu dalam penyelenggaraan Rumah Sakit ;

Menanda tangani surat-surat rutin sebatas kewenangan dan khususnya yang tidak terkait langsung dengan masalah keuangan ;

Menandatanagani Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan surat-surat lain sejenis yang bersifat mendesak ;

Selaku Ymt Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN dengan menyatakan dirinya sebagai Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSJD Surakarta atas nama Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan surat Nomor : 460/3414/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005 mengusulkan defisit penggantian dana untuk PKPS BBM Bid Kes Tahun 2004 sebesar Rp. 2.334.505.334,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) kepada Menteri Kesehatan RI di Jakarta untuk pelayanan kesehatan pasien miskin di RSJD Surakarta dengan cara yang tidak benar, yaitu :

Memasukkan data pasien miskin yang tidak benar tanggal 27 November 2002 s/d 31 Desember 2002, tanggal 01 Januari 2003 s/d 31 Desember 2003, tanggal 01 September 2004 s/d 31 Desember 2004, karena telah dibayarkan atau dibiayai oleh Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2004 dan juga memasukan data pasien miskin yang mendapat keringanan biaya pengobatan sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang seharusnya tidak berhak mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya PKPS BBM Bid Kes selaku pasien miskin ;

Tanda tangan dan stempel persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang pada waktu itu dijabat oleh dr. BUDIHardja, DTM & H, MPH yang tercantum dalam surat pengusulan penggantian defisit PKPS BBM Bid Kes tahun 2004 Nomor : 460/3414/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005 adalah tidak benar atau palsu ;

Bahwa pengajuan penggantian dana defisit PKPS BBM Bid Kes Tahun 2004 yang diajukan oleh Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN atas nama Direktur RSJD Surakarta disetujui oleh Menteri Kesehatan RI dengan Surat Keputusan Nomor : 02/Menkes/ SK/I/2006 tanggal 04 Januari 2006 tentang Penggantian Defisit Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang Kesehatan untuk Pelayanan Pasien Miskin tahun 2004, yang menyebutkan bahwa RSJD Surakarta mendapatkan dana sebesar Ro, 2,334,505,334,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Untuk mencairkan dana tersebut diperlukan data pendukung berupa data jumlah pasien miskin yang telah dilayani oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Itjen Depkes RI) ;

Pada bulan Februari 2006 pada saat dr. Siti Nur Aini Arief Sp.Kj. yang sebelumnya sejak bulan Januari 2006 menjabat sebagai Direktur RSJD Surakarta, telah datang Tim Verifikasi dari Itjen Depkes RI ke RSJD Surakarta dengan tugas dan tujuan melakukan verifikasi data pendukung usulan pengajuan dana penggantian defisit PKPS BBM Bidang Kesehatan Tahun 2004 sebagaimana yang telah diusulkan sebelumnya oleh Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN selaku Wadir Administrasi dan Keuangan RSJD Surakarta ;

Hal. 33 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Tim Verifikasi Itjen Depkes RI melakukan Verifikasi telah meminta data pasien miskin berupa data pasien miskin rawat jalan dan data pasien miskin rawat inap yang telah ditangani RSJD Surakarta sebagai kelengkapan syarat pencairan pengganti dana defisit PKPS BBM tahun 2004 yang diajukan sebelumnya oleh Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN. Atas permintaan dari Tim Verifikasi Itjend Depkes RI tersebut. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2006 dr. Siti Nur Aini Arief Sp.Kj. telah melengkapi dan menyerahkan data yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua Verifikasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yaitu dr. Hendrina AK, Sp.Kj. dan Ketua Pengelola Dana PKPS BBM yaitu dr. Rukma Astuti tersebut serta diketahui dan ditandatangani oleh dr. SITI NURAINI ARIEF, Sp.Kj. selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Tim Verifikasi Itjend Depkes RI yaitu :

Data nama-nama pasien miskin yang telah dibayarkan atau dibiayai oleh anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2004 ;

Data pasien miskin yang mendapat keringanan biaya pengobatan sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang seharusnya tidak berhak mendapatkan biaya PKPS BBM Bid Kes selaku pasien miskin, yaitu :

NO.	BULAN	RAWAT JALAN		RAWAT INAP			JUMLAH UANG
		GAKIN	JUMLAH Rp	GAKIN	HARI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	November 2002	175 org	4.777.800	14 org	673	21.735.789	26.513.589
2.	Desember 2002	186 org	5.276.375	103 org	4.949	162.437.260	167.713.635
3.	Januari 2003	192 org	5.564.025	114 org	4.665	161.040.515	166.604.540
4.	Februari 2003	171 org	4.959.795	89 org	3.485	118.572.890	123.532.685
5.	Maret 2003	214 org	6.160.690	125 org	5.284	174.506.300	180.666.990
6.	April 2003	222 org	6.415.458	119 org	5.170	173.495.450	179.910.908
7.	Mei 2003	194 org	5.505.160	97 org	3.406	114.464.015	119.969.175
8.	Juni 2003	220 org	6.101.575	111 org	3.887	144.398.760	150.500.335
9.	Juli 2003	232 org	6.700.510	94 org	3.280	117.436.500	124.137.010
10.	Agustus 2003	228 org	6.367.405	99 org	4.127	138.082.400	144.44.805
11.	September 2003	211 org	6.175.490	123 org	4.379	147.081.400	153.256.890
14.	Desember 2003	240 org	6.706.975	118 org	4.638	150.354.700	157.061.675
15.	September 2004	230 org	6.466.750	30 org	891	27.331.610	33.798.360
16.	Oktober 2004	229 org	6.886.075	105 org	2.315	72.85.150	78.971.225
17.	November 2004	218 org	6.316.435	111 org	2.473	79.428.950	85.745.385
18.	Desember 2004	238 org	6.743.445	1 Olor	2.023	66.610.675	73.354.120
	Jumlah	3.811 org	108.736.098	1.782 org	63.745	2.134.884.879	2.243.670.977



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa memasukkan data pasien yang mendapat keringanan sampai dengan 50% tersebut, bertentangan dengan SK Menkes RI No. 553/MenKes/SK/IV/2003 tertanggal 22 April 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPS-BBM BIDKES karena mengambil data yang sudah dibayarkan oleh APBD Provinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya data pasien RSJD Surakarta diverifikasi oleh Tim Verifikasi Itjen Depkes RI yang hasilnya Tim Verifikasi Itjen Depkes RI menyatakan bahwa RSJD Surakarta mengalami defisit sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 90.834.357,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dari dana penggantian defisit PKPS BBM Bid Kes yang diajukan RSJD Surakarta sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.334.505.334,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Atas temuan Tim Verifikasi Itjen Depkes RI tersebut, kemudian pada tanggal 20 Juni 2006, dengan sepengetahuan dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj., RSJD Surakarta mengembalikan kelebihan dana penggantian defisit PKPS BBM Bid Kes Tahun 2004 sebesar Rp. 90.834.357,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) ke kas Negara melalui Kantor Bank BRI Cabang Solo ;

Kemudian pada tanggal 16 Mei 2006 dr. Siti Nuraini A., Sp.Kj. selaku Direktur RSJD Surakarta telah memerintahkan kasir penerima yaitu Nur Rosyid untuk mencairkan dana pengganti defisit PKPS BBM Bid Kes sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) di Bank Britama BRI Surakarta, selanjutnya dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj. melalui memo atau surat tanggal 04 Mei 2006 kepada Nur

Hal. 35 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosyid, agar dana tersebut disetorkan ke kas Daerah Penda Provinsi Jawa Tengah sebagai Pendapatan RSJD Surakarta, kemudian disetorkan dengan surat tanda setoran Nomor : 109/RSJD/Slo/2006 Bank Cabang Jateng dengan Nomor Rekening : 1034.01503.7 sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Padahal dana sejumlah tersebut tidak merupakan Pendapatan RSJD Surakarta ;

Dari penyeteroran dana Penggantian Defisit PKPS BBM Bid Kes tahun 2004 sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah ,yang oleh dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj. diakui sebagai pendapatan RSJD Surakarta tersebut, pihak RSJD Surakarta menerima pengembalian dari Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 30% sejumlah Rp. 673.101.293,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sebagai uang jasa pelayanan, yang semestinya sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah yang berbunyi kepada instansi pemungut retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari realisasi retribusi yang disetorkan ke kantor Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah, tidak dibenarkan menerima pengembalian uang sebesar 30% tersebut karena uang sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang disetorkan tersebut bukan merupakan hasil pendapatan RSJD Surakarta, selain menerima pengembalian yang tidak benar sejumlah Rp. 673.101.293,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), RSJD Surakarta juga menerima jasa pelayanan rutin yang resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk bulan Mei 2006 sebesar Rp. 58.139.640,00 (lima puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) diterima melalui transfer ke rekening Direktur RSJD Surakarta yang seluruhnya sejumlah Rp. 731.240.933 (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

Berdasarkan memo atau surat dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj. selaku Direktur RSJD Surakarta tanggal 17 Juni 2006 kepada Tim PKPS BBM/JPS BK tahun 2002, 2003 dan 2004 yaitu Kusdiah, Handayani, dan Nur Rosyid untuk menyisihkan uang sebesar Rp. 495.820.495,- (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dan pada tanggal 19 Juni 2006 dana tersebut di transfer ke Bank BRI Britama atas nama Direktur RSJD Surakarta, sedangkan sisanya sebesar Rp. 235.420.438,- (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) diambil oleh Sri Handayani staf pada bagian keuangan RSJD Surakarta, dan pada tanggal 20 Juni 2006 oleh Sri Handayani atas perintah dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj. dibagikan kepada seluruh pegawai RSJD Surakarta termasuk Terdakwa seolah-olah sebagai uang jasa pelayanan, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain dengan perincian sebagai berikut :

NO.	N A M A	PENERIMAAN BERSIH
	DIREKTUR	
1.	dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj.	Rp. 4.057.300,-
	WAKIL DIREKTUR	
2.	dr. Dwi Priyo Hartono, Sp.Kj.	Rp. 2.704.900,-
3.	dr. H. Sigit Wahyu Purnomo, Sp.Kj.	Rp. 2.704.900,-
	KABAG & KABID	
4.	Drs. Joko Supomo	Rp. 1.352.400,-
5.	Dra. Sutarmi, Apt.	Rp. 1.352.400,-
6.	Suranto, AMK.	Rp. 1.352.400,-
7.	dr. Ita	Rp. 1.352.400,-
	KA.SUBAG & KA.SIE	
8.	Slamet, SH.M.Hum.	Rp. 1.014.300,-
9.	Drs. Bambang Supriyono	Rp. 1.014.300,-
10.	Drs. Slamet Budi Prasetyo	Rp. 1.014.300,-
11.	Pribadi Suharjo, BA.	Rp. 1.014.300,-
12.	Yuliati, SH.	Rp. 1.014.300,-
13.	Harjono, AMK.	Rp. 1.014.300,-

Hal. 37 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Dra. Sri Wahyuni, Apt.	Rp. 1.014.300,-
15.	Sri Wiyani, SMPh.SKM	Rp. 1.014.300,-
16.	Yetty Mulyati	Rp. 1.014.300,-
17.	Bagus Alit Putra, SKM	Rp. 1.014.300,-
18.	Sri Indari, AMK.	Rp. 1.014.300,-
19.	Endang Setyaningsih	Rp. 1.014.300,-
20.	Sukardi, S.Kp.	Rp. 1.014.300,-
PSIKIATER		
21.	dr. Hendrina A. Kuhuwael, Sp.Kj.	Rp. 784.500,-
22.	dr. Rahayu Budi Mulyanto, Sp.Kj.	Rp. 775.800,-
DOKTER UMUM		
23.	dr. Bambang Hirjanto	Rp. 673.600,-
24.	dr. Wibowo	Rp. 645.200,-
25.	dr. Rukma Astuti	Rp. 645.200,-
26.	dr. Heniwati	Rp. 685.000,-
27.	dr. H. Amsal, AM.MHA.	Rp. 702.000,-
28.	dr. Setyowati Raharjo	Rp. 594.000,-
29.	dr. Rino Pratondo Adji	Rp. 588.400,-
30.	dr. Fitra Primanditha	Rp. 588.400,-
DOKTER HARLEP		
31.	dr. Hasanudin	Rp. 409.300,-
32.	dr. Safrudin	Rp. 409.300,-
33.	dr. Adriesta Herdaetha	Rp. 409.300,-
DOKTER GIGI		
34.	drg. Noviasari SS.	Rp. 540.000,-
PSIKOLOG		
35.	Dra. Sri Karmini	Rp. 570.800,-
36.	Dra. Endang Suparti SS.	Rp. 505.900,-
37.	Dra. M.M. Indah Sundari	Rp. 551.400,-
38.	Dra. Sepi Indriyati	Rp. 483.200,-
39.	Miratun Hasanah, S.Psi.	Rp. 454.800,-
40.	Ismiyati Yuliatun, S.Psi.	Rp. 449.100,-
41.	Drs. Partana, Apt.	Rp. 579.800,-
42.	Dra. Trihidayati, Apt.	Rp. 488.900,-
43.	Drg. Budiyanto	Rp. 528.700,-
KA. BANGSAL		
44.	Yati Suryati	Rp. 488.900,-
45.	Sri Muljanti	Rp. 488.200,-
46.	Suyoko	Rp. 466.100,-
47.	Agus Sutoko	Rp. 460.500,-
48.	Lukas Mudjijono	Rp. 397.900,-
49.	Anik Sundari	Rp. 471.800,-
50.	Warno, Skep.	Rp. 466.100,-
51.	Sa'adah	Rp. 454.800,-
52.	Ni Wayan Margitri	Rp. 511.600,-
53.	Ruth Herawati	Rp. 488.900,-
54.	Okawati Herni Saefutri, S.Kep.	Rp. 528.700,-
55.	Sudarni	Rp. 494.800,-
56.	Untung Saifurahmawan	Rp. 403.600,-
57.	Drs. Supriyono	Rp. 579.800,-
STAFF UPF		
58.	Purwanto	Rp. 392.200,-
59.	Kusuma Wardani	Rp. 386.600,-
60.	Hadi Yuwono	Rp. 483.200,-
61.	Agus Suharyanto	Rp. 329.700,-
PERAWAT DAN PP		
62.	Eko Sunaryanti	Rp. 358.100,-
63.	Emy Farida Indriawati	Rp. 255.800,-
64.	Siti Musyarifah	Rp. 352.400,-
65.	Siti Puji Mulyani	Rp. 295.600,-
66.	Titik Supriyati	Rp. 272.900,-
67.	Sulami	Rp. 227.400,-
68.	Sutanti	Rp. 244.400,-
69.	Dyah Suprihatin	Rp. 210.300,-
70.	Suci Sarkawini	Rp. 238.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.	Arum Aryandari, Skep.	Rp.	324.000,-
72.	Yulius Kriswanto, Skep.	Rp.	352.400,-
73.	Nuning Purwanti	Rp.	363.800,-
74.	Rita Tri Soebekti, Skep.	Rp.	341.100,-
75.	Sumarti	Rp.	253.000,-
76.	Sri Suparti	Rp.	272.900,-
77.	Sunarwi	Rp.	278.500,-
78.	Agnes Giyarni	Rp.	267.200,-
PERAWAT			
79.	Lilia Dwi Pujiastuti	Rp.	375.200,-
80.	Sri Sutarmi	Rp.	403.600,-
81.	Mardi Utomo	Rp.	369.500,-
82.	Budiyono	Rp.	369.500,-
83.	Rini Sunaryati	Rp.	375.200,-
84.	Timin	Rp.	341.100,-
85.	Tri Wahyudiyanto	Rp.	307.000,-
86.	Sugiyono	Rp.	307.000,-
87.	R. Agus Mardianto	Rp.	307.000,-
88.	Sri Pujiati	Rp.	363.800,-
PEKARYA PERAWATAN			
89.	Kushartono	Rp.	335.400,-
90.	Suldi	Rp.	307.000,-
91.	Sri Riyani	Rp.	349.600,-
92.	Tri Winarni	Rp.	364.300,-
93.	Maskuri (UGD)	Rp.	321.200,-
94.	Sumiyannah	Rp.	264.300,-
95.	Suratno UGD	Rp.	335.400,-
96.	Winarno	Rp.	261.500,-
97.	Sutrisna	Rp.	326.900,-
98.	Sri Mulyani	Rp.	284.200,-
99.	Sumardi REHAB	Rp.	307.000,-
100.	Sumiyarsana	Rp.	335.400,-
101.	Ratno	Rp.	321.200,-
102.	Paiman	Rp.	341.100,-
103.	Mulyono	Rp.	295.600,-
104.	Marimin	Rp.	244.400,-
105.	Warsito	Rp.	244.400,-
106.	Wardani	Rp.	244.400,-
107.	Subari	Rp.	221.700,-
108.	Sugiyanti	Rp.	278.500,-
PERAWAT			
109.	Mudjito	Rp.	386.600,-
110.	Fatoni	Rp.	380.900,-
111.	Widodo	Rp.	341.100,-
112.	Slamet Riyadi	Rp.	346.800,-
113.	Inalisa Mudono	Rp.	369.500,-
114.	Siti Taslimah	Rp.	375.200,-
115.	M. Mispan	Rp.	369.500,-
116.	Jaka Mursito	Rp.	369.500,-
117.	Supriyanto	Rp.	460.500,-
118.	Nurwindyah Widiningsih	Rp.	341.100,-
119.	Sri Haryati	Rp.	392.200,-
120.	Ni Ketut Mudiari	Rp.	369.500,-
121.	Suranto	Rp.	346.800,-
122.	Sri Winarti	Rp.	307.000,-
123.	Arman Susanto	Rp.	329.700,-
124.	Irwan Heru Priyanto	Rp.	329.700,-
125.	Mardini, Skep	Rp.	505.900,-
126.	Sugiyana	Rp.	329.700,-
127.	Kustini	Rp.	346.800,-
128.	Siti Nurchaeni	Rp.	352.400,-
129.	Andi Nugroho	Rp.	335.400,-
130.	Muhammad Z.A.	Rp.	307.000,-
131.	Joko Sri Pujianto, S.Kep.	Rp.	352.400,-
132.	Imam Rifai	Rp.	352.400,-

Hal. 39 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133.	Muhammad Sukandar	Rp.	324.000,-
134.	Ahmad Rafiq Muhajir	Rp.	352.400,-
135.	Yuli M. Kartiko	Rp.	307.000,-
136.	Setyo Priyono	Rp.	335.400,-
137.	Ahmad Su'ib	Rp.	307.000,-
138.	Sumianto	Rp.	329.700,-
139.	Paridi	Rp.	289.900,-
140.	Mujiyono, S.Kep.	Rp.	341.100,-
141.	Edy Wiyono	Rp.	301.300,-
142.	Sri Rahayu	Rp.	253.000,-
143.	Nunuk Sri Sejatiningsih	Rp.	301.300,-
144.	Heru Sriyanto, Amk.	Rp.	301.300,-
145.	Tri Setya Budiyantha, Amk.	Rp.	272.900,-
146.	Sri Mulyani, Amk.	Rp.	272.900,-
147.	Yunita Widyastuti, Amk.	Rp.	272.900,-
148.	Joko Kuncoro	Rp.	289.900,-
149.	Afik Driyanto, S.Kep.	Rp.	369.500,-
150.	Adi Dwi Priyanto Purnomo	Rp.	301.300,-
151.	Agus Sriyanto	Rp.	235.900,-
152.	Heru Spto Budiyanto, S.Kep.	Rp.	369.500,-
153.	Pupus Risnawati	Rp.	289.900,-
154.	Lilik Sri Wahyuni	Rp.	318.300,-
155.	Yuli Sumarni	Rp.	289.900,-
156.	Milan Rahmawati	Rp.	278.500,-
157.	Riyati	Rp.	250.100,-
158.	Ariyani	Rp.	278.500,-
159.	Yuli Purwaningsih	Rp.	275.700,-
160.	Sri Rahayu	Rp.	238.800,-
161.	Sulistiyowatik	Rp.	278.500,-
162.	Pudji Lestari	Rp.	289.900,-
163.	Djoko Witoyo	Rp.	278.500,-
164.	Eko Budi Raharjo	Rp.	278.500,-
165.	Supriono	Rp.	278.500,-
166.	Puji Rahayu	Rp.	250.100,-
167.	Suwito	Rp.	250.100,-
168.	Dwi Sri Hartanti	Rp.	278.500,-
169.	Suparmi	Rp.	238.800,-
170.	Yenita Antonio	Rp.	278.500,-
171.	Yuni Widayanti	Rp.	278.500,-
172.	Hidayat	Rp.	250.100,-
173.	Supriyanto	Rp.	238.800,-
174.	Kusumastuti Retno	Rp.	272.900,-
175.	Sri Handayani	Rp.	272.900,-
176.	Ita Agustina	Rp.	261.500,-
177.	Luluk Purnomo	Rp.	231.100,-
178.	Bagyo	Rp.	261.500,-
179.	Titin Trinawan	Rp.	221.700,-
PEKARYA PERAWATAN			
180.	Sri Subagiyo UP	Rp.	295.600,-
181.	F.X. Edy Sutikno	Rp.	278.500,-
182.	Priyanto	Rp.	278.500,-
183.	Madyo Wilopo	Rp.	292.800,-
184.	Sutirah	Rp.	278.500,-
185.	Sardjiman	Rp.	253.000,-
186.	Titus Suwarno	Rp.	287.100,-
187.	Triyatno	Rp.	270.000,-
188.	Kasimin	Rp.	284.200,-
189.	Purwanto	Rp.	321.200,-
190.	Wiyono	Rp.	321.200,-
191.	Suradji	Rp.	255.800,-
192.	Suparno Rubiyanto	Rp.	255.800,-
193.	Suyati	Rp.	309.800,-
194.	Agus Sriyanto	Rp.	309.800,-
195.	Suparto	Rp.	253.000,-
196.	Riyanto	Rp.	253.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197.	Suparno	Rp.	295.600,-
198.	Supadno	Rp.	281.400,-
199.	Mardiyatmi	Rp.	253.000,-
200.	Joko Triyono	Rp.	275.700,-
201.	Sumardjo	Rp.	301.300,-
202.	Murpiati	Rp.	289.900,-
203.	Sugiyatmi	Rp.	267.200,-
204.	Suwarno	Rp.	250.100,-
205.	Sulastrri	Rp.	221.700,-
206.	Ngadino	Rp.	193.300,-
207.	Sri Sunarni	Rp.	227.400,-
208.	Suparman	Rp.	216.000,-
209.	Mujiyo	Rp.	241.600,-
210.	Sumarso	Rp.	284.200,-
211.	Suparna	Rp.	284.200,-
212.	Sukarman	Rp.	238.800,-
213.	Totok Sutarno	Rp.	224.500,-
214.	Suharni	Rp.	224.500,-
215.	Sutarja	Rp.	230.200,-
216.	Sumardi, Adm. Fis.	Rp.	216.000,-
217.	Parno GIZI	Rp.	272.900,-
218.	Surahmi	Rp.	238.800,-
219.	Paidi	Rp.	224.500,-
220.	Sudinaryo	Rp.	238.800,-
221.	S. Sri Soetarmini	Rp.	250.100,-
222.	Intiyartini	Rp.	210.300,-
223.	Sunarto	Rp.	230.200,-
224.	Slamet Suryadi	Rp.	210.300,-
225.	Hartoyo GIZI	Rp.	267.200,-
226.	Edy Rahmadi GIZI	Rp.	307.000,-
PARAMEDIS NON PERAWATA N			
227.	Endang Rochini	Rp.	366.700,-
228.	Kade Fini Irawati	Rp.	443.400,-
229.	Suyono	Rp.	295.600,-
230.	Heru Kriswanto	Rp.	309.800,-
231.	Darmawan Jufri	Rp.	338.200,-
232.	Woro Kamarina	Rp.	466.100,-
233.	Jumadil Rosta	Rp.	338.200,-
234.	Ngatmiyatun	Rp.	304.100,-
235.	Ririn Ernawati	Rp.	361.000,-
236.	Puji Hartati SKM	Rp.	329.700,-
237.	Naryo	Rp.	275.700,-
238.	Madyo Utoro	Rp.	224.500,-
239.	E. Bekti Susi Utami	Rp.	275.700,-
240.	Teguh Broto HS.	Rp.	275.700,-
241.	Aris Wibowo, ST.	Rp.	329.700,-
242.	Endah Sri Suharti	Rp.	315.500,-
243.	Dwi Harimurti	Rp.	372.300,-
244.	Sri Parwijati	Rp.	315.500,-
245.	Suhadi	Rp.	298.400,-
246.	Dewi Purnamaningsih	Rp.	287.100,-
247.	Parniati	Rp.	270.000,-
248.	Achmad Zaenuri	Rp.	298.400,-
249.	Edi Purwanto	Rp.	349.600,-
250.	Joko Ariyanto	Rp.	264.300,-
251.	Irma Rachmawati	Rp.	258.600,-
252.	Mohamad Pujiarso	Rp.	258.600,-
REHABILITASI			
253.	Sri Redjeki	Rp.	289.900,-
254.	Sri Supartini	Rp.	301.300,-
255.	Sulasono	Rp.	386.600,-
256.	Purwanto	Rp.	301.300,-
257.	Tri Riyatni R. Parwati	Rp.	278.500,-
258.	Kadarisman	Rp.	301.300,-
259.	G. Krisnawati (Wisanggeni)	Rp.	329.700,-

Hal. 41 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260.	Srijadi	Rp.	278.500,-
261.	Sardi	Rp.	289.900,-
262.	Agus Suroyo	Rp.	292.800,-
263.	Anton Gunawan (Staf UGD)	Rp.	335.400,-
264.	Dalima	Rp.	278.500,-
265.	Tabah Suprpti	Rp.	255.800,-
266.	Retno Maruti	Rp.	250.100,-
267.	Sri Suharsi	Rp.	278.500,-
268.	Ngadiman (SENA)	Rp.	216.000,-
269.	Budi Prasadja	Rp.	216.000,-
270.	Kadi Riyanto	Rp.	221.700,-
271.	Arini Kurniati	Rp.	284.200,-
JASA KONSULTASI KHUSUS			
272.	dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj.	Rp.	495.820.495,-
273.	dr. Hendrina A. Kuhuwael, Sp.Kj.	Rp.	1.840.800,-
274.	dr. Sigit Wahyu Purnomo, Sp.Kj.	Rp.	23.764.200,-
275.	dr. Dwi Priyo Hartono, Sp.Kj.	Rp.	3.047.500,-
276.	dr. Bambang Hirjanto	Rp.	703.000,-
277.	dr. Heniwati	Rp.	527.500,-
278.	dr. Rukma Astuti	Rp.	872.500,-
279.	dr. Dwi Priyo Hartono, Sp.Kj.	Rp.	5.402.200,-
280.	dr. Ita	Rp.	454.500,-
281.	dr. Budiyanto	Rp.	64.500,-
282.	dr. Setyowati	Rp.	436.500,-
283.	drs. Partana, Apt.	Rp.	618.600,-
284.	Ida Bagus Alit Putra, Amk.	Rp.	1.085.000,-
285.	Dra. Dwi Faridayanti	Rp.	697.400,-
286.	Dra. Sri Karmini	Rp.	168.700,-
287.	Kade Fini Irawati	Rp.	422.000,-
288.	dr. H. Amsal AM., MHA.	Rp.	946.000,-
289.	dr. Rino Pratondo Adji	Rp.	696.000,-
290.	dr. Fitra Primanditha	Rp.	399.500,-
291.	dr. Agung	Rp.	1.431.000,-
292.	dr. Rahayu Budi Mulyanto, Sp.Kj.	Rp.	1.845.300,-
DOKTER JAGA			
293.	dr. Etha	Rp.	200.000,-
294.	dr. Rino	Rp.	360.000,-
295.	dr. Agung P.	Rp.	200.000,-
296.	dr. Hasanudin	Rp.	240.000,-
297.	dr. Sumarji	Rp.	120.000,-
298.	dr. Nugraheni	Rp.	160.000,-
299.	dr. Safrudin	Rp.	80.000,-
PELAYANAN ADMINISTRASI			
300.	Basuki Murlijanto	Rp.	366.700,-
301.	Drs. Sri Munir	Rp.	500.200,-
302.	Drs. Munawir	Rp.	432.000,-
303.	Dra. Dwi Faridayanti	Rp.	528.700,-
304.	Dra. C. Anik Irawati	Rp.	500.200,-
305.	Dra. ME. Kusdyah SW.	Rp.	642.400,-
306.	Drs. Sarjana	Rp.	420.700,-
307.	Sumina, SIP.	Rp.	432.000,-
308.	Dra. Dyah Sri Marwati	Rp.	466.100,-
309.	Setya Budi Harsana, SE.	Rp.	366.700,-
310.	Sudiyanto, Bsc.	Rp.	409.300,-
311.	Soewardji	Rp.	312.700,-
312.	Retno Suryaningsih	Rp.	309.800,-
313.	Adi Sunarto	Rp.	309.800,-
314.	Suyatno	Rp.	329.700,-
315.	Sumarni M.	Rp.	318.300,-
316.	Pujiyani	Rp.	315.500,-
317.	T.W. Djoko Suminar	Rp.	352.400,-
318.	Giyono	Rp.	369.500,-
319.	Suharno	Rp.	312.700,-
320.	Sri Giyanto	Rp.	312.700,-
321.	Sri Waliyanti	Rp.	335.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322.	Raden Hery Sutanto	Rp.	449.100,-
323.	Dayaningsih	Rp.	460.500,-
324.	Hari Waskitaningsih, SE.	Rp.	406.400,-
325.	Ujiyanti	Rp.	278.500,-
326.	Agnes Widayani S.	Rp.	307.000,-
327.	Kusuma Dwi Wardani	Rp.	449.100,-
328.	Tri Kusdiati	Rp.	312.700,-
329.	Sri Ajeng Winarni	Rp.	307.000,-
330.	A. Sugeng Haryanto	Rp.	318.300,-
331.	Tangkasati	Rp.	278.500,-
332.	Johanes Suharno	Rp.	562.800,-
333.	Ratsrini	Rp.	307.000,-
334.	Siti Kustiyah	Rp.	278.500,-
335.	Mrajak	Rp.	335.400,-
336.	Sutadi	Rp.	363.800,-
337.	Witarso	Rp.	307.000,-
338.	Pudyastuti	Rp.	318.300,-
339.	Sektiono	Rp.	562.800,-
340.	Apsari Dwi Martini, S.Sos.	Rp.	375.200,-
341.	Purwanto	Rp.	307.000,-
342.	Sussi Sukarangesti	Rp.	335.400,-
343.	Siti Suryani	Rp.	335.400,-
344.	Sucipto	Rp.	392.200,-
345.	Sri Widodo	Rp.	278.500,-
346.	Widartining	Rp.	335.400,-
347.	Edy Supriyanti, SE.	Rp.	406.400,-
348.	Yohana Dwi Listiyani	Rp.	307.000,-
349.	Wisnu Setyo Budi	Rp.	289.900,-
350.	Subur Iriyanto	Rp.	335.400,-
351.	Sri Handayani	Rp.	534.400,-
352.	Dwi Fitriyanto	Rp.	449.100,-
353.	Winarsi	Rp.	534.532,-
354.	Sri Sunarni	Rp.	278.500,-
355.	Surti Winarni	Rp.	307.000,-
356.	Bima Widiagung	Rp.	449.100,-
357.	Antonius Kusumastoyo	Rp.	278.500,-
358.	Harijono	Rp.	307.000,-
359.	Kukuh Suwito	Rp.	449.100,-
360.	Giati Triyanie	Rp.	321.200,-
361.	Ning Haryuningsih	Rp.	307.000,-
362.	Sularni	Rp.	335.400,-
363.	Sunaryo B.	Rp.	278.500,-
364.	Ratih	Rp.	307.000,-
365.	Sri Mujiyati	Rp.	307.000,-
366.	Mulati	Rp.	278.500,-
367.	Tatik Saparini (rehab)	Rp.	307.000,-
368.	Isni Yunaiti	Rp.	307.000,-
369.	Joko Hudi Rohmad	Rp.	477.500,-
370.	Sri Haryani	Rp.	301.300,-
371.	Joko Dalmadi	Rp.	329.700,-
372.	Sutiarsi	Rp.	301.300,-
373.	Sumardi	Rp.	301.300,-
374.	F.X. Bambang Soesilo	Rp.	267.200,-
375.	Adi Sunarno	Rp.	272.900,-
376.	Hartono Narodoseno (I. Farmasi)	Rp.	301.300,-
377.	Widati	Rp.	335.400,-
378.	Suroso	Rp.	278.500,-
379.	Meilaton Basukiningsih	Rp.	449.100,-
380.	Suratna	Rp.	329.700,-
381.	Marmadi	Rp.	289.900,-
382.	Djoko Utomo	Rp.	278.500,-
383.	Nur Rosyid	Rp.	471.800,-
384.	Subroto, Bc.Hk.	Rp.	307.000,-
385.	Rukiman	Rp.	295.600,-
386.	Untari	Rp.	289.900,-

Hal. 43 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

387.	Marjoko	Rp.	261.500,-
388.	Sriyanto, S.Sos.	Rp.	372.300,-
389.	Dul Qodir	Rp.	375.200,-
390.	Kiyatno, SE.	Rp.	341.100,-
391.	Siti Aisyah	Rp.	378.000,-
392.	Paryanto	Rp.	284.200,-
393.	Mujiono	Rp.	426.300,-
394.	Mulyono	Rp.	264.300,-
395.	Rantono	Rp.	227.400,-
396.	Totok Hardiyanto, SKM.	Rp.	307.000,-
397.	Aning Kholifah	Rp.	264.300,-
398.	Hanny Kurniasih	Rp.	264.300,-
399.	Sukristyoso, Bc.Hk.	Rp.	346.800,-
400.	Misni Arwati	Rp.	250.100,-
401.	Sugiyanto (sanitasi)	Rp.	204.600,-
402.	Suroso	Rp.	264.300,-
403.	Bambang Subiyanto	Rp.	253.000,-
404.	Sri Mulyono	Rp.	224.500,-
405.	Haryani	Rp.	253.000,-
406.	Harmadi	Rp.	318.300,-
407.	Mulyanto	Rp.	309.800,-
408.	Suparman	Rp.	324.000,-
409.	Wuryanto	Rp.	224.500,-
410.	Legimin	Rp.	304.100,-
411.	Suparmi	Rp.	221.700,-
412.	Sumardi	Rp.	289.900,-
413.	Sardito	Rp.	261.500,-
414.	Sutiyo	Rp.	261.500,-
415.	Kayati	Rp.	250.100,-
416.	Ramelan	Rp.	193.300,-
417.	Hariyanti	Rp.	278.500,-
418.	Lamiyem	Rp.	216.000,-
419.	Kayat	Rp.	210.300,-
420.	Kusnadi	Rp.	244.400,-
421.	Sugeng	Rp.	216.000,-
422.	Supriyanto	Rp.	324.000,-
423.	Sugiyanto	Rp.	267.200,-
424.	Gunadi	Rp.	267.200,-
425.	Parmin	Rp.	272.900,-
426.	Mudjiyanto	Rp.	187.600,-
427.	Santosa	Rp.	216.000,-
428.	Djoko Suroso	Rp.	216.000,-
429.	R. Supirah	Rp.	216.000,-
430.	Sarwono (Bsl)	Rp.	224.500,-
431.	Dasuki	Rp.	250.100,-
432.	Dalimin	Rp.	187.600,-
433.	Purwaningsih	Rp.	250.100,-
434.	Suparno	Rp.	292.800,-
435.	Sudadi	Rp.	267.200,-
436.	Yarngan	Rp.	267.200,-
437.	Lagiyo	Rp.	221.700,-
438.	Yusuf A.S. UGD	Rp.	307.000,-
439.	Murjanta	Rp.	187.600,-
440.	Istamarwati	Rp.	362.400,-
441.	Sakirman	Rp.	201.800,-
442.	Sukardi	Rp.	179.100,-
443.	Siswanto	Rp.	179.100,-
444.	Ngarsani	Rp.	179.100,-
445.	Istiani	Rp.	164.900,-
446.	Agung Prasetyo Aji	Rp.	164.900,-
447.	Wiwit Iswadi	Rp.	164.900,-
448.	Catur Setyobudi	Rp.	164.900,-
449.	Purwanto	Rp.	164.900,-
450.	Endah Nugrahini	Rp.	164.900,-
451.	Amin Rochmadi	Rp.	164.900,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452.	Setiawan Heri Putranto	Rp.	164.900,-
453.	Wahyu Purnami	Rp.	164.900,-
454.	Dwi Mulatiningsih	Rp.	164.900,-
455.	Astri Eko Sri Handayani	Rp.	164.900,-
456.	Nurul Fadhilah	Rp.	164.900,-
457.	Sri Nuryatmi	Rp.	164.900,-
458.	Fitriani Wulandari	Rp.	164.900,-
459.	Niniek Sulistiowati	Rp.	164.900,-
460.	Sri Mulyani	Rp.	164.900,-
461.	Khristina Andriyani	Rp.	164.900,-
462.	Sarmi Setyani	Rp.	164.900,-
463.	Yulianto Catur Nugroho	Rp.	150.600,-
464.	Sugeng	Rp.	164.900,-
465.	Pebriyanto, Amd. OT	Rp.	136.400,-
466.	Estysetyaningsih, Amd. OT	Rp.	136.400,-
467.	Sri Mulyani	Rp.	136.400,-
468.	Tri Maryanto	Rp.	136.400,-
469.	Tutik Sripartini	Rp.	136.400,-
470.	Puryanto	Rp.	136.400,-
471.	Triyanto	Rp.	136.400,-
472.	Ratih Rahmawati	Rp.	136.400,-
473.	Rekno Widayati	Rp.	136.400,-
474.	Joko Purnomo	Rp.	136.400,-
475.	Dina Risnawati	Rp.	136.400,-
476.	Rangga Chrisnawati	Rp.	136.400,-
477.	Jumali	Rp.	136.400,-
478.	Betzeda Dewi W.	Rp.	136.400,-
479.	Windardi	Rp.	136.400,-
480.	Ninik Sulistyaningsih	Rp.	136.400,-
481.	Sriyono	Rp.	136.400,-
482.	Agung Susilo	Rp.	136.400,-
483.	Joko Untoro	Rp.	136.400,-
484.	Agus Hartanto	Rp.	136.400,-
485.	Eko Budiyo	Rp.	136.400,-
486.	Wisnu Trilaksono	Rp.	136.400,-
487.	Muh. Iswahyu Handoyo	Rp.	136.400,-
488.	Budiyo	Rp.	136.400,-
489.	Fajar Syaifudin	Rp.	136.400,-
490.	Abdul Bashir	Rp.	136.400,-
491.	Sonny Shyndoro S.	Rp.	136.400,-
492.	Sri Winastuti	Rp.	136.400,-
493.	Zeeky Oktavianto	Rp.	136.400,-
494.	Hendri Santoso	Rp.	136.400,-
495.	Nurwantini	Rp.	136.400,-
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)			
496.	dr. Agung Priatmaja	Rp.	505.900,-
497.	Mamik Puspasari, S.Kep.	Rp.	352.400,-
498.	Sulistyaningsih, S.Kep.	Rp.	352.400,-
499.	Hartini, Amd. Gizi	Rp.	301.300,-
500.	Mohamad Al Amin, Amk.	Rp.	272.900,-
501.	Joni Raharjo, Amk.	Rp.	272.900,-
502.	Wahyu Widiyanti, Amk.	Rp.	272.900,-
503.	Tri Andri Pujiyanti, Amk.	Rp.	272.900,-
504.	Apriyanto Ari Setiyawan, Amk.	Rp.	272.900,-
505.	Asih Sudaryanto, Amk.	Rp.	272.900,-
506.	Suwito, Amk.	Rp.	301.300,-
507.	Setya Ari Bawanti	Rp.	307.000,-

Kemudian karena ada desakan dari seluruh Pegawai RSJD Surakarta, maka dana tersebut oleh dr. Siti Nuraini

Hal. 45 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief, Sp.Kj. dibagikan keseluruhan karyawan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta termasuk juga pensiunan Pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta (sesuai memori Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta pada tanggal 17 Juli 2006 dan bukti penerimaan jasa pelayanan seluruh karyawan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta pada tanggal 27 Juli 2006). Pembagian dana tersebut juga uang jasa pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta untuk bulan Juni 2006 sebesar Rp. 177.280.798,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan uang yang disimpan di rekening an. Direktur Rumah Sakit Jiwa Surakarta sebesar Rp. 495.820.495,- (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) kepada seluruh karyawan beserta pensiunannya dengan rincian sebagai berikut :

NO.	N A M A	PENERIMAAN BERSIH
	DIREKTUR	
1.	dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj.	Rp. 14.475.700,-
	WAKIL DIREKTUR	
2.	dr. Dwi Priyo Hartono, Sp.Kj.	Rp. 9.650.500,-
3.	dr. H. Sigit Wahyu Purnomo, Sp.Kj.	Rp. 9.650.500,-
	KABAG & KABID	
4.	Drs. Joko Supomo	Rp. 4.825.200,-
5.	Dra. Sutarmi, Apt.	Rp. 4.825.200,-
6.	Suranto, AMK.	Rp. 4.825.200,-
7.	dr. Ita	Rp. 4.825.200,-
	KA.SUBAG & KA.SIE	
8.	Slamet, SH.M.Hum.	Rp. 3.618.900,-
9.	Drs. Bambang Supriyono	Rp. 3.618.900,-
10.	Drs. Slamet Budi Prasetyo	Rp. 3.618.900,-
11.	Pribadi Suharjo, BA.	Rp. 3.618.900,-
12.	Yulianti, SH.	Rp. 3.618.900,-
13.	Harjono, AMK.	Rp. 3.618.900,-
14.	Dra. Sri Wahyuni, Apt.	Rp. 3.618.900,-
15.	Sri Wiyani, SMPh.SKM	Rp. 3.618.900,-
16.	Yetty Mulyati	Rp. 3.618.900,-
17.	Bagus Alit Putra, SKM	Rp. 3.618.900,-
18.	Sri Indari, AMK.	Rp. 3.618.900,-
19.	Endang Setyaningsih	Rp. 3.618.900,-
20.	Sukardi, S.Kp.	Rp. 3.618.900,-
	PSIKIATER	
21.	dr. Hendrina A. Kuhuwaal, Sp.Kj.	Rp. 2.801.600,-
22.	dr. Rahayu Budi Mulyanto, Sp.Kj.	Rp. 2.801.600,-
	DOKTER UMUM	
23.	dr. Bambang Hirjanto	Rp. 2.405.200,-
24.	dr. Wibowo	Rp. 2.304.200,-
25.	dr. Rukma Astuti	Rp. 2.304.200,-
26.	dr. Heniwati	Rp. 2.446.300,-
27.	dr. H. Amsal, AM.MHA.	Rp. 2.507.200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	dr. Setyowati Raharjo	Rp. 2.121.500,-
29.	dr. Rino Pratondo Adji	Rp. 2.101.200,-
30.	dr. Fitra Primanditha	Rp. 2.101.200,-
	DOKTER HARLEP	
31.	dr. Hasanudin	Rp. 1.242.400,-
32.	dr. Safrudin	Rp. 1.242.400,-
33.	dr. Adriesta Herdaetha	Rp. 1.242.400,-
	DOKTER GIGI	
34.	drg. Noviasari SS.	Rp. 1.928.600,-
	PSIKOLOG	
35.	Dra. Sri Karmini	Rp. 2.070.700,-
36.	Dra. Endang Suparti SS.	Rp. 1.806.800,-
37.	Dra. M.M. Indah Sundari	Rp. 1.969.200,-
38.	Dra. Sepi Indriyati	Rp. 1.725.600,-
39.	Miratun Hasanah, S.Psi.	Rp. 1.624.100,-
40.	Ismiyati Yuliatun, S.Psi.	Rp. 1.603.800,-
41.	Drs. Partana, Apt.	Rp. 2.070.700,-
42.	Dra. Trihidayati, Apt.	Rp. 1.745.900,-
43.	drg. Budiyanto	Rp. 1.888.000,-
	KA. BANGSAL	
44.	Yati Suryati	Rp. 1.745.900,-
45.	Sri Muljanti	Rp. 1.725.600,-
46.	Suyoko	Rp. 1.664.700,-
47.	Agus Sutoko	Rp. 1.644.400,-
48.	Lukas Mudjijono	Rp. 1.421.100,-
49.	Anik Sundari	Rp. 1.665.000,-
50.	Warno, Skep.	Rp. 1.664.700,-
51.	Sa'adah	Rp. 1.624.100,-
52.	Ni Wayan Margitri	Rp. 1.827.100,-
53.	Ruth Herawati	Rp. 1.745.900,-
54.	Okawati Herni Saefutri, S.Kep.	Rp. 1.888.000,-
55.	Sudarni	Rp. 1.766.200,-
56.	Untung Saifurahmawan	Rp. 1.441.400,-
57.	Drs. Supriyono	Rp. 2.070.700,-
	STAFF UPF	
58.	Purwanto	Rp. 1.400.800,-
59.	Kusuma Wardani	Rp. 1.380.500,-
60.	Hadi Yuwono	Rp. 1.725.600,-
61.	Agus Suharyanto	Rp. 1.177.500,-
	PERAWAT DAN PP	
62.	Eko Sunaryanti	Rp. 1.279.000,-
63.	Emy Farida Indriawati	Rp. 776.500,-
64.	Siti Musyarifah	Rp. 1.258.700,-
65.	Siti Puji Mulyani	Rp. 897.300,-
66.	Titik Supriyati	Rp. 974.500,-
67.	Sulami	Rp. 690.200,-
68.	Sutanti	Rp. 742.000,-
69.	Dyah Suprihatin	Rp. 638.500,-
70.	Suci Sarkawini	Rp. 724.800,-
71.	Arum Aryandari, Skep.	Rp. 1.157.200,-
72.	Yulius Kriswanto, Skep.	Rp. 1.258.700,-
73.	Nuning Purwanti	Rp. 1.299.300,-
74.	Rita Tri Soebekti, Skep.	Rp. 1.218.100,-
75.	Sumarti	Rp. 767.900,-
76.	Sri Suparti	Rp. 828.300,-
77.	Sunarwi	Rp. 845.500,-
78.	Agnes Giyarni	Rp. 811.000,-
	PERAWAT	
79.	Lilia Dwi Pujiastuti	Rp. 1.339.900,-
80.	Sri Sutarmi	Rp. 1.441.400,-
81.	Mardi Utomo	Rp. 1.319.600,-
82.	Budiyono	Rp. 1.319.600,-
83.	Rini Sunaryati	Rp. 1.339.900,-
84.	Timin	Rp. 1.035.400,-
85.	Tri Wahyudiyanto	Rp. 931.800,-

Hal. 47 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.	Sugiyono	Rp. 931.800,-
87.	R. Agus Mardianto	Rp. 931.800,-
88.	Sri Pujiati	Rp. 1.299.300,-
PEKARYA PERAWATAN		
89.	Kushartono	Rp. 1.197.800,-
90.	Suldi	Rp. 1.096.300,-
91.	Sri Riyani	Rp. 1.248.500,-
92.	Tri Winarni	Rp. 802.400,-
93.	Maskuri (UGD)	Rp. 975.000,-
94.	Sumiyanah	Rp. 802.400,-
95.	Suratno UGD	Rp. 1.018.100,-
96.	Winarno	Rp. 933.900,-
97.	Sutrisna	Rp. 1.167.300,-
98.	Sri Mulyani	Rp. 1.015.100,-
99.	Sumardi REHAB	Rp. 1.096.300,-
100.	Sumiyarsana	Rp. 1.197.800,-
101.	Ratno	Rp. 1.147.000,-
102.	Paiman	Rp. 1.218.100,-
103.	Mulyono	Rp. 897.300,-
104.	Marimin	Rp. 742.000,-
105.	Warsito	Rp. 742.000,-
106.	Wardani	Rp. 742.000,-
107.	Subari	Rp. 673.000,-
108.	Sugiyanti	Rp. 845.500,-
PERAWAT		
109.	Mudjito	Rp. 1.380.500,-
110.	Fatoni	Rp. 1.360.200,-
111.	Widodo	Rp. 1.218.100,-
112.	Slamet Riyadi	Rp. 1.238.400,-
113.	Inalisa Mudono	Rp. 1.319.600,-
114.	Siti Taslimah	Rp. 1.339.900,-
115.	M. Mispan	Rp. 1.319.600,-
116.	Jaka Mursito	Rp. 1.319.600,-
117.	Supriyanto	Rp. 1.644.400,-
118.	Nurwindyah Widiningsih	Rp. 1.218.100,-
119.	Sri Haryati	Rp. 1.400.800,-
120.	Ni Ketut Mudiari	Rp. 1.319.600,-
121.	Suranto	Rp. 1.238.400,-
122.	Sri Winarti	Rp. 1.096.300,-
123.	Arman Susanto	Rp. 1.177.500,-
124.	Irwan Heru Priyanto	Rp. 1.177.500,-
125.	Mardini, Skep	Rp. 1.806.800,-
126.	Sugiyana	Rp. 1.177.500,-
127.	Kustini	Rp. 1.238.400,-
128.	Siti Nurchaeni	Rp. 1.258.700,-
129.	Andi Nugroho	Rp. 1.018.100,-
130.	Muhammad Z.A.	Rp. 931.800,-
131.	Joko Sri Pujiyanto, S.Kep.	Rp. 1.258.700,-
132.	Imam Rifai	Rp. 1.258.700,-
133.	Muhammad Sukandar	Rp. 1.157.200,-
134.	Ahmad Rafiq Muhajir	Rp. 1.258.700,-
135.	Yuli M. Kartiko	Rp. 931.800,-
136.	Setyo Priyono	Rp. 1.018.100,-
137.	Ahmad Su'ib	Rp. 931.800,-
138.	Sumianto	Rp. 1.000.000,-
139.	Paridi	Rp. 880.100,-
140.	Mujiyono, S.Kep.	Rp. 1.218.100,-
141.	Edy Wiyono	Rp. 914.600,-
142.	Sri Rahayu	Rp. 767.900,-
143.	Nunuk Sri Sejatiningsih	Rp. 914.600,-
144.	Heru Sriyanto, Amk.	Rp. 914.600,-
145.	Tri Setya Budiyanata, Amk.	Rp. 828.300,-
146.	Sri Mulyani, Amk.	Rp. 828.300,-
147.	Yunita Widyastuti, Amk.	Rp. 828.300,-
148.	Joko Kuncoro	Rp. 880.100,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149.	Afik Driyanto, S.Kep.	Rp. 1.319.600,-
150.	Adi Dwi Priyanto Purnomo	Rp. 914.600,-
151.	Agus Sriyanto	Rp. 966.300,-
152.	Heru Spto Budiyanto, S.Kep.	Rp. 1.319.600,-
153.	Pupus Risnawati	Rp. 880.100,-
154.	Lilik Sri Wahyuni	Rp. 966.300,-
155.	Yuli Sumarni	Rp. 880.100,-
156.	Milan Rahmawati	Rp. 845.500,-
157.	Riyati	Rp. 759.300,-
158.	Ariyani	Rp. 845.000,-
159.	Yuli Purwaningsih	Rp. 836.500,-
160.	Sri Rahayu	Rp. 724.800,-
161.	Sulistiyowatik	Rp. 645.500,-
162.	Pudji Lestari	Rp. 880.100,-
163.	Djoko Witoyo	Rp. 845.500,-
164.	Eko Budi Raharjo	Rp. 845.500,-
165.	Supriono	Rp. 845.500,-
166.	Puji Rahayu	Rp. 759.300,-
167.	Suwito	Rp. 759.300,-
168.	Dwi Sri Hartanti	Rp. 845.500,-
169.	Suparmi	Rp. 724.800,-
170.	Yenita Antonio	Rp. 845.500,-
171.	Yuni Widayanti	Rp. 845.500,-
172.	Hidayat	Rp. 759.300,-
173.	Supriyanto	Rp. 724.800,-
174.	Kusumastuti Retno	Rp. 828.300,-
175.	Sri Handayani	Rp. 828.300,-
176.	Ita Agustina	Rp. 793.800,-
177.	Luluk Purnomo	Rp. 707.500,-
178.	Bagyo	Rp. 793.800,-
179.	Titin Trinawan	Rp. 673.000,-
PEKARYA PERAWATAN		
180.	Sri Subagiyo UP	Rp. 1.055.700,-
181.	F.X. Edy Sutikno	Rp. 994.800,-
182.	Priyanto	Rp. 994.800,-
183.	Madyo Wilopo	Rp. 1.045.500,-
184.	Sutirah	Rp. 845.500,-
185.	Sardjiman	Rp. 767.900,-
186.	Triyatno	Rp. 819.700,-
187.	Kasimin	Rp. 862.800,-
188.	Purwanto	Rp. 975.000,-
189.	Wiyono	Rp. 828.300,-
190.	Suradji	Rp. 776.500,-
191.	Suparno Rubiyanto	Rp. 776.500,-
192.	Suyati	Rp. 940.500,-
193.	Agus Sriyanto	Rp. 940.500,-
194.	Suparto	Rp. 767.900,-
195.	Riyanto	Rp. 767.900,-
196.	Suparno	Rp. 897.300,-
197.	Supadno	Rp. 854.200,-
198.	Mardiyatmi	Rp. 767.900,-
199.	Joko Triyono	Rp. 836.900,-
200.	Sumardjo	Rp. 914.600,-
201.	Murpiati	Rp. 880.100,-
202.	Sugiatmi	Rp. 811.000,-
203.	Jasmiko	Rp. 224.300,-
204.	Sulastrri	Rp. 673.000,-
205.	Ngadino	Rp. 586.700,-
206.	Sri Sunarni	Rp. 690.200,-
207.	Suparman	Rp. 655.700,-
208.	Mujiyo	Rp. 733.400,-
209.	Sumarso	Rp. 862.800,-
210.	Suparna	Rp. 862.800,-
211.	Sukarman	Rp. 724.800,-
212.	Totok Sutarno	Rp. 681.600,-

Hal. 49 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213.	Suharni	Rp.	661.600,-
214.	Sutarja	Rp.	698.900,-
215.	Sumardi, Adm.Fis.	Rp.	655.700,-
216.	Parno GIZI	Rp.	828.300,-
217.	Surahmi	Rp.	724.800,-
218.	Paidi	Rp.	681.600,-
219.	Sudinryo	Rp.	724.800,-
220.	S. Sri Soetarmini	Rp.	759.300,-
221.	Intiyartini	Rp.	638.500,-
222.	Sunarto	Rp.	698.900,-
223.	Slamet Suryadi	Rp.	638.500,-
224.	Hartoyo GIZI	Rp.	811.000,-
225.	Edy Rahmadi GIZI	Rp.	931.800,-
PARAMEDIS NON PERAWATA N			
226.	Endang Rochini	Rp.	1.309.400,-
227.	Kade Fini Irawati	Rp.	1.583.500,-
228.	Suyono	Rp.	1.055.700,-
229.	Heru Kriswanto	Rp.	1.106.400,-
230.	Darmawan Jufri	Rp.	1.207.900,-
231.	Woro Kamarina	Rp.	1.664.700,-
232.	Jumadil Rosta	Rp.	1.207.900,-
233.	Ngatmiyatun	Rp.	1.086.100,-
234.	Ririn Ernawati	Rp.	1.289.100,-
235.	Puji Hartati SKM	Rp.	1.177.500,-
236.	Naryo	Rp.	836.900,-
237.	Madyo Utoro	Rp.	681.600,-
238.	E. Bakti Susi Utami	Rp.	836.900,-
239.	Teguh Broto HS.	Rp.	836.900,-
240.	Aris Wibowo, ST.	Rp.	1.177.500,-
241.	Endah Sri Suharti	Rp.	1.126.700,-
242.	Dwi Harimurti	Rp.	1.329.700,-
243.	Sri Parwijati	Rp.	1.126.700,-
244.	Suhadi	Rp.	1.065.800,-
245.	Dewi Purnamaningsih	Rp.	1.025.200,-
246.	Parniati	Rp.	819.700,-
247.	Achmad Zaenuri	Rp.	905.900,-
248.	Edi Purwanto	Rp.	1.061.300,-
249.	Joko Ariyanto	Rp.	802.400,-
250.	Irma Rachmawati	Rp.	785.200,-
251.	Mohamad Pujiarso	Rp.	785.200,-
REHABILITASI			
252.	Sri Redjeki	Rp.	1.035.400,-
253.	Sri Supartini	Rp.	1.076.000,-
254.	Sulasono	Rp.	1.380.500,-
255.	Purwanto	Rp.	1.076.000,-
256.	Tri Riyatni R. Parwati	Rp.	994.800,-
257.	Kadarisman	Rp.	1.076.000,-
258.	G. Krisnawati (Wisanggeni)	Rp.	1.177.500,-
259.	Srijadi	Rp.	994.800,-
260.	Sardi	Rp.	1.035.400,-
261.	Agus Suroyo	Rp.	1.045.500,-
262.	Anton Gunawan (Staf UGD)	Rp.	1.197.800,-
263.	Dalima	Rp.	845.500,-
264.	Tabah Suprapti	Rp.	776.500,-
265.	Retno Maruti	Rp.	759.300,-
266.	Sri Suharsi	Rp.	994.800,-
267.	Ngadiman (SENA)	Rp.	655.700,-
268.	Budi Prasadja	Rp.	655.700,-
269.	Kadi Riyanto	Rp.	673.000,-
270.	Arini Kurniati	Rp.	1.015.100,-
JASA KONSULTASI KHUSUS			
271.	dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj.	Rp.	90.868.672,-
272.	dr. Hendrina A. Kuhuwaal, Sp.Kj.		-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273.	dr. Sigit Wahyu Purnomo, Sp.Kj.	Rp. 10.096.510,-
274.	dr. Dwi Priyo Hartono, Sp.Kj.	-
275.	dr. Bambang Hirjanto	-
276.	dr. Heniwati	-
277.	dr. Rukma Astuti	-
278.	dr. Dwi Priyo Hartono, Sp.Kj.	-
279.	dr. Ita	-
280.	drg. Budiyanto	-
281.	dr. Setyowati	-
282.	Drs. Partana, Apt.	-
283.	Ida Bagus Alit Putra, Amk.	-
284.	Dra. Dwi Faridayanti	-
285.	Dra. Sri Karmini	-
286.	Kade Fini Irawati	-
287.	dr. H. Amsal AM., MHA.	-
288.	dr. Rino Pratondo Adji	-
289.	dr. Fitra Primanditha	-
290.	dr. Agung	-
291.	dr. Rahayu Budi Mulyanto, Sp.Kj.	-
DOKTER JAGA		
292.	dr. Etha	-
293.	dr. Rino	-
294.	dr. Agung P.	-
295.	dr. Hasanudin	-
296.	dr. Sumarji	-
297.	dr. Nugraheni	-
298.	dr. Safrudin	-
PELAYANAN ADMINISTRASI		
299.	Basuki Murlijanto	Rp. 1.309.400,-
300.	Drs. Sri Munir	Rp. 1.786.500,-
301.	Drs. Munawir	Rp. 1.542.900,-
302.	Dra. Dwi Faridayanti	Rp. 1.888.000,-
303.	Dra. C. Anik Irawati	Rp. 1.786.500,-
304.	Dra. ME. Kusdyah SW.	Rp. 2.294.000,-
305.	Drs. Sarjana	Rp. 1.502.300,-
306.	Sumina, SIP.	Rp. 1.542.900,-
307.	Dra. Dyah Sri Marwati	Rp. 1.664.700,-
308.	Setya Budi Harsana, SE.	Rp. 1.309.400,-
309.	Sudiyanto, Bsc.	Rp. 1.461.700,-
310.	Soewardji	Rp. 1.116.600,-
311.	Retno Suryaningsih	Rp. 1.106.400,-
312.	Adi Sunarto	Rp. 1.106.400,-
313.	Suyatno	Rp. 1.177.500,-
314.	Sumarni M.	Rp. 1.136.900,-
315.	Pujiyanti	Rp. 1.126.700,-
316.	T.W. Djoko Suminar	Rp. 1.258.700,-
317.	Giyono	Rp. 1.319.600,-
318.	Suharno	Rp. 1.116.600,-
319.	Sri Giyanto	Rp. 1.116.600,-
320.	Sri Waliyanti	Rp. 1.197.800,-
321.	Raden Hery Sutanto	Rp. 1.603.800,-
322.	Dayaningsih	Rp. 1.644.400,-
323.	Hari Waskitaningsih, SE.	Rp. 1.451.500,-
324.	Ujiyanti	Rp. 994.800,-
325.	Agnes Widayani S.	Rp. 1.096.300,-
326.	Kusuma Dwi Wardani	Rp. 1.603.800,-
327.	Tri Kusdiati	Rp. 1.116.600,-
328.	Sri Ajeng Winarni	Rp. 1.096.300,-
329.	A. Sugeng Haryanto	Rp. 1.136.000,-
330.	Tangkasati	Rp. 994.800,-
331.	Johanes Suharno	Rp. 2.009.800,-
332.	Ratsrini	Rp. 1.096.300,-
333.	Siti Kustiyah	Rp. 994.800,-
334.	Mrajak	Rp. 1.197.800,-
335.	Sutadi	Rp. 1.299.300,-

Hal. 51 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336.	Witarso	Rp. 1.096.300,-
337.	Pudyastuti	Rp. 1.136.900,-
338.	Sektiono	Rp. 2.009.800,-
339.	Apsari Dwi Martini, S.Sos.	Rp. 1.339.900,-
340.	Purwanto	Rp. 1.096.300,-
341.	Sussi Sukarangesti	Rp. 1.197.800,-
342.	Siti Suryani	Rp. 1.197.800,-
343.	Sucipto	Rp. 1.400.800,-
344.	Sri Widodo	Rp. 994.800,-
345.	Widartining	Rp. 1.197.800,-
346.	Edy Supriyanti, SE.	Rp. 1.451.500,-
347.	Yohana Dwi Listiyani	Rp. 1.096.300,-
348.	Wisnu Setyo Budi	Rp. 1.035.400,-
349.	Subur Iriyanto	Rp. 1.197.800,-
350.	Sri Handayani	Rp. 1.908.300,-
351.	Dwi Fitriyanto	Rp. 1.603.800,-
352.	Winarsi	Rp. 1.909.511,-
353.	Sri Sunarni	Rp. 994.800,-
354.	Surti Winarni	Rp. 1.096.300,-
355.	Bima Widiagung	Rp. 1.603.800,-
356.	Antonius Kusumastoyo	Rp. 994.800,-
357.	Harijono	Rp. 1.096.300,-
358.	Kukuh Suwito	Rp. 1.603.800,-
359.	Giati Triyanie	Rp. 1.147.000,-
360.	Ning Haryuningsih	Rp. 1.096.300,-
361.	Sularni	Rp. 1.197.800,-
362.	Sunaryo B.	Rp. 994.800,-
363.	Ratih	Rp. 1.096.300,-
364.	Sri Mujiyati	Rp. 1.096.300,-
365.	Mulati	Rp. 994.800,-
366.	Tatik Saparini (rehab)	Rp. 1.096.300,-
367.	Isni Yunaiti	Rp. 1.096.300,-
368.	Joko Hudi Rohmad	Rp. 1.705.300,-
369.	Sri Haryani	Rp. 1.076.000,-
370.	Joko Dalmadi	Rp. 1.177.500,-
371.	Sutiarsi	Rp. 1.076.000,-
372.	Sumardi	Rp. 1.076.000,-
373.	F.X. Bambang Soesilo	Rp. 954.200,-
374.	Adi Sunarno	Rp. 974.500,-
375.	Hartono Narodoseno (I. Farmasi)	Rp. 1.076.000,-
376.	Widati	Rp. 1.197.800,-
377.	Suroso	Rp. 994.800,-
378.	Meilatun Basukiningsih	Rp. 1.603.800,-
379.	Suratna	Rp. 1.177.500,-
380.	Marmadi	Rp. 1.035.400,-
381.	Djoko Utomo	Rp. 994.800,-
382.	Nur Rosyid	Rp. 1.685.000,-
383.	Subroto, Bc.Hk.	Rp. 1.096.300,-
384.	Rukiman	Rp. 1.055.700,-
385.	Untari	Rp. 1.035.400,-
386.	Marjoko	Rp. 793.800,-
387.	Sriyanto, S.Sos.	Rp. 1.329.700,-
388.	Dul Qodir	Rp. 1.138.900,-
389.	Kiyatno, SE.	Rp. 1.035.400,-
390.	Siti Aisyah	Rp. 1.350.000,-
391.	Paryanto	Rp. 862.800,-
392.	Mujiono	Rp. 1.294.200,-
393.	Mulyono	Rp. 802.400,-
394.	Rantono	Rp. 690.200,-
395.	Totok Hardiyanto, SKM.	Rp. 931.800,-
396.	Aning Kholifah	Rp. 802.400,-
397.	Hanny Kurniasih	Rp. 802.400,-
398.	Sukristyoso, Bc.Hk.	Rp. 1.238.400,-
499.	Misni Arwati	Rp. 759.300,-
400.	Sugiyanto (sanitasi)	Rp. 621.200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401.	Rubaliyati	Rp.	940.500,-
402.	Suroso	Rp.	802.400,-
403.	Bambang Subiyanto	Rp.	767.900,-
404.	Sri Mulyono	Rp.	681.600,-
405.	Haryani	Rp.	767.600,-
406.	Harmadi	Rp.	966.300,-
407.	Mulyanto	Rp.	940.500,-
408.	Suparman	Rp.	983.600,-
409.	Wuryanto	Rp.	681.600,-
410.	Legimin	Rp.	923.200,-
411.	Prasetyaningsih Nuraini	Rp.	215.700,-
412.	Suparmi	Rp.	673.000,-
413.	Sumardi	Rp.	880.100,-
414.	Sardito	Rp.	793.800,-
415.	Sutiyono	Rp.	793.800,-
416.	Kayati	Rp.	759.300,-
417.	Ramelan	Rp.	586.700,-
418.	Hariyanti	Rp.	845.500,-
419.	Lamiyem	Rp.	655.700,-
420.	Kayat	Rp.	638.500,-
421.	Kusnadi	Rp.	742.000,-
422.	Sugeng	Rp.	655.700,-
423.	Supriyanto	Rp.	983.600,-
424.	Sugiyanto	Rp.	811.000,-
425.	Gunadi	Rp.	811.000,-
426.	Parmin	Rp.	828.300,-
427.	Mudjijanto	Rp.	569.500,-
428.	Santosa	Rp.	655.700,-
429.	Djoko Suroso	Rp.	655.700,-
430.	R. Supirah	Rp.	655.700,-
431.	Sarwono (Bsl)	Rp.	681.600,-
432.	Dasuki	Rp.	759.300,-
433.	Dalimin	Rp.	569.500,-
434.	Purwaningsih	Rp.	759.300,-
435.	Suparno	Rp.	888.700,-
436.	Sudadi	Rp.	811.000,-
437.	Yarngan	Rp.	811.000,-
438.	Lagiyo	Rp.	673.000,-
439.	Yusuf A.S. UGD	Rp.	931.800,-
440.	Murjanta	Rp.	569.500,-
441.	Istamarwati	Rp.	1.069.900,-
442.	Sakirman	Rp.	612.600,-
443.	Sukardi	Rp.	543.600,-
444.	Siswanto	Rp.	543.600,-
445.	Ngarsani	Rp.	543.600,-
446.	Istiani	Rp.	500.400,-
447.	Agung Prasetyo Aji	Rp.	500.400,-
448.	Wiwit Iswadi	Rp.	500.400,-
449.	Catur Setyobudi	Rp.	500.400,-
450.	Purwanto	Rp.	500.400,-
451.	Endah Nugrahini	Rp.	500.400,-
452.	Amin Rochmadi	Rp.	500.400,-
453.	Setiawan Heri Putranto	Rp.	500.400,-
454.	Wahyu Purnami	Rp.	500.400,-
455.	Dwi Mulatiningsih	Rp.	500.400,-
456.	Astri Eko Sri Handayani	Rp.	500.400,-
457.	Nurul Fadhillah	Rp.	500.400,-
458.	Sri Nuryatmi	Rp.	500.400,-
459.	Fitriani Wulandari	Rp.	500.400,-
460.	Ninie Sulistiowati	Rp.	500.400,-
461.	Sri Mulyani	Rp.	500.400,-
462.	Khristina Andriyani	Rp.	500.400,-
463.	Sarmi Setyani	Rp.	500.400,-

Hal. 53 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464.	Yulianto Catur Nugroho	Rp.	457.300,-
465.	Sugeng	Rp.	500.400,-
466.	Pebriyanto, Amd. OT	Rp.	414.100,-
467.	Estysetyaningsih, Amd. OT	Rp.	414.100,-
468.	Sri Mulyani	Rp.	414.100,-
469.	Tri Maryanto	Rp.	414.100,-
470.	Tutik Sripartini	Rp.	414.100,-
471.	Puryanto	Rp.	414.100,-
472.	Triyanto	Rp.	414.100,-
473.	Ratih Rahmawati	Rp.	414.100,-
474.	Rekno Widayati	Rp.	414.100,-
475.	Joko Purnomo	Rp.	414.100,-
476.	Dina Risnawati	Rp.	414.100,-
477.	Rangga Chrisnawati	Rp.	414.100,-
478.	Jumali	Rp.	414.100,-
479.	Betzeda Dewi W.	Rp.	414.100,-
480.	Windardi	Rp.	414.100,-
481.	Ninik Sulistyaningsih	Rp.	414.100,-
482.	Sriyono	Rp.	414.100,-
483.	Agung Susilo	Rp.	414.100,-
484.	Joko Untoro	Rp.	414.100,-
485.	Agus Hartanto	Rp.	414.100,-
486.	Eko Budiyanto	Rp.	414.100,-
487.	Wisnu Trilaksono	Rp.	414.100,-
488.	Muh. Iswahyu Handoyo	Rp.	414.100,-
489.	Budiyono	Rp.	414.100,-
490.	Fajar Syaifudin	Rp.	414.100,-
491.	Abdul Bashir	Rp.	414.100,-
492.	Sonny Shyndoro S.	Rp.	414.100,-
493.	Sri Winastuti	Rp.	414.100,-
494.	Zeeky Oktavianto	Rp.	414.100,-
495.	Hendri Santoso	Rp.	414.100,-
496.	Nurwantini	Rp.	414.100,-
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)			
497.	dr. Agung Priatmaja	Rp.	1.806.800,-
498.	Mamik Puspasari, S.Kep.	Rp.	1.258.700,-
499.	Sulistyaningsih, S.Kep.	Rp.	1.258.700,-
500.	Hartini, Amd. Gizi	Rp.	914.700,-
501.	Mohamad Al Amin, Amk.	Rp.	828.300,-
502.	Joni Raharjo, Amk.	Rp.	828.300,-
503.	Wahyu Widiyanti, Amk.	Rp.	828.300,-
504.	Tri Andri Pujiанти, Amk.	Rp.	828.300,-
505.	Apriyanto Ari Setiyawan, Amk.	Rp.	828.300,-
506.	Asih Sudaryanto, Amk.	Rp.	828.300,-
507.	Suwito, Amk.	Rp.	914.600,-
508.	Setya Ari Bawanti	Rp.	639.500,-

Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 673.101.293,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sesuai Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK RI Nomor : 23/S/II- X/08/2007 tertanggal 07 Agustus 2007 atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 10 Oktober 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membebaskan Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menyatakan Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan SUBSIDAIR, melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu : "MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" ;

Hal. 55 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Menjatuhkan Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 673.101.293,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng dengan Terdakwa dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj., dr. Henderina A. Kuhuwael, Sp.Kj. dan dr. Rukma Astuti (BAP terpisah atau split), jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menyatakan barang bukti berupa uang tunai dan surat-surat yang terdiri dari :

A.	Pengajuan Dana JPS yang belum diklaimkan untuk bulan 27 November 2002 s/d 31 Desember 2002 bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 dan bulan 25 September 2004 s/d Desember 2004 ; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02/MENKES/KS/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Penggantian Defisit Dana PKPS BBM BIDKES untuk pelayanan kesehatan pasien miskin di Rumah Sakit tahun 2004 ; Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 824/1725/8/2006 tanggal 19 Agustus 2006 tentang Pembentukan Panitia Realisasi Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta ; Surat dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor : PS.01.01.1.3 tanggal April 2006 perihal Permintaan Tindak Lanjut Verivikasi Itjen Atas Pengelolaan Dana PKPS BBM BID KES pada RSJD Surakarta Tahun Anggaran 2004 ;
----	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Surat dari Departemen Kesehatan RI Inspektorat Jenderal Nomor : 01.T.P.S.06.00212.06.250 tertanggal 24 April 2006 perihal Laporan Hasil Verifikasi Itjen Atas Pengelolaan Dana PKPS BBM tahun 2004 di 22 (dua puluh dua) rumah sakit ;</p> <p>Rincian Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta hari Senin tanggal 15 Mei 2006 ;</p> <p>Dokumen Anggaran Satuan Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 untuk RSJ Surakarta ;</p> <p>Surat Tanda Setoran Nomor : 109/RSJD.Slo/2006 tanggal 16 Mei 2006 ke Bank Jateng Cabang Utama/Cabang Jawa Tengah Rekening Nomor : 1034.01503.977 sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;</p> <p>Surat Tanda Setoran Nomor : 60/RSJD.Ska/2006 / tanggal 04 Agustus 2006 ke Bank Jateng Cabang Utama/Cabang Jawa Tengah Rekening Nomor : 1034.01503.7 sebesar Rp. 16.094.425,- (enam belas juta sembilan puluh empat ratus dua puluh lima rupiah) ;</p> <p>Kwitansi Penerimaan PDE tertanggal 03 Agustus 2006 sebesar Rp. 16.094.425,- (enam belas juta sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;</p> <p>Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Nur Rosyid tertanggal 04 Mei 2006 ;</p> <p>Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Nur Rosyid tertanggal 17 Juli 2006 ;</p> <p>Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Tim Pembagi/Pembantu kegiatan 19 Juli 2006 ;</p> <p>Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Kusdiyah/Handayani/Nur Rosyid tertanggal 17 Juni 2006 ;</p> <p>Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Nur Rosyid tertanggal 01 Agustus 2006 ;</p> <p>Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 20 Juni 2006 ;</p>
B.	<p>Data-data pasien miskin yang diajukan klaim ;</p> <p>Data hasil verifikasi dari Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan ;</p> <p>Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Direktur RSJD Surakarta tahun 2002 – 2004 ;</p> <p>Foto copy Buku Tabungan BRI dan BPD ;</p> <p>Laporan Realisasi PKPS BBM Bid Kes tahun 2002 – 2004 ;</p>
C.	<p>Buku Kas Umum PKPS BBM Didkes RSJD Surakarta tahun 2004 ;</p>

Hal. 57 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



D.	Buku Pendaftaran Pasien Periode 12 November 2001 s/d 01 April 2002 ; Buku Pendaftaran Pasien Periode 02 April 2002 s/d Agustus 2002 ; Buku Pendaftaran Pasien Periode 24 Agustus 2002 s/d 27 Januari 2003 ; Buku Pendaftaran Pasien Periode 28 Januari 2003 s/d 11 Juni 2003 ; Buku Pendaftaran Pasien Periode 12 Juni 2003 s/d 07 November 2003 ; Buku Pendaftaran Pasien Periode 08 November 2003 s/d 29 Maret 2004 ; Buku Pendaftaran Pasien Periode 30 Maret 2004 s/d 13 Agustus 2004 ; Buku Pendaftaran Pasien Periode 14 Agustus 2004 s/d 31 Desember 2004 ;
E.	Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkes RI Nomor : HK.00.SJ.SE.I.0198 tanggal 23 Februari 2005, perihal Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkes tentang Pelaksanaan Program JPK-MM tahun 2005 ; Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1414A/MENKES/SK/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005 beserta lampirannya tentang Penggantian Defisit Dana PKPS BBM BDKES untuk Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin di Rumah Sakit Tahun 2004 ; Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02/MENKES/SK/I/2006 tanggal 04 Januari 2006 beserta lampirannya tentang Penggantian Defisit Dana PKPS BBM Bidkes untuk Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin di Rumah Sakit Tahun 2004 ; Surat Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Dep.Kes RI Nomor : PS.01.01.1.3.1453 tanggal 17 April 2006 perihal Permintaan Tindak Lanjut Verifikasi Itjen Atas Pengelolaan Dana PKPS BBM Bidkes pada RSJD Surakarta Tahun Anggaran 2004 ; Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI tanggal 09 Mei 2005 perihal Rencana Anggaran Biaya bagi Rumah Sakit yang devisit ; Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Yankes Gakin Nomor : KS.00.02.8.00.071 tanggal 26 Januari 2005 perihal Pembukuan Rekening RS di BRI Program JPK MM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surat dari Inspektorat Jenderal Depkes RI Nomor : 01.T.PS.06.00.212.06.450 tanggal 24 April 2006 perihal Laporan Hasil Verifikasi Defisit Dana PKPS BBM tahun 2004 di 22 Rumah Sakit ;
F.	Buku Bantu Disposisi Pasien Gakin/Buku Kartu Sehat JPS 14 Desember 2000 s/d 26 September 2001 ; Buku Bantu Disposisi Pasien Gakin/Buku Kartu Sehat JPS 26 September 2001 s/d April 2002 ;
G.	Buku Agenda surat masuk JPS Gakin pada Sub Bagian Tata Usaha di RSJD Surakarta ; Per tanggal 26 November 2002 s/d 15 Juli 2003 ; Per tanggal 15 Juli 2003 s/d 31 Mei 2004 ; Per tanggal 01 Juni 2004 s/d 31 Januari 2005 ;
H.	Agenda masuk (umum) tahun 2005 mulai tanggal 01 Januari 2005 s/d 18 September 2006 ; Agenda keluar tanggal 03 Januari 2005 s/d 31 Agustus 2005 ; Agenda keluar tanggal 01 September 2005 s/d 04 Juli 2006 ; Agenda keringanan tanggal 24 Juni 2002 s/d 24 Mei 2005 ; Agenda sisipan tanggal 02 Februari 2005 s/d 19 April 2007 ; Agenda kartu sehat tanggal 01 Juni 2002 s/d 26 November 2002 ;
I.	Surat Dirjen Bina Pelayanan Medik De.Kes RI No. PR.03.03.1.1.4060 tanggal 16 September 2005 perihal permintaan isian form verifikasi RS/BP4/BKMM devisit ; Surat Direktur RSJD Surakarta No. 460/3414/10/05 tanggal 11 Oktober 2005 perihal Form Verifikasi PKPS BBM Bidang Kesehatan ; Surat Inspektorat Jenderal No. 03.R.PS.03.02.36.06.33 tanggal 13 Maret 2006 perihal Laporan Hasil Verifikasi ;
J.	Uang sebesar Rp. 1.570.569.684,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) ;
K.	Laporan pertanggungjawaban dana PKPS BBM tahun 2001, 2002, 2003, 2004 ; Buku kas besar dana PKPS BBM tahun 2001, 2002, 2003, 2004 ; Tanda terima pembagian JP mulai Januari – Desember 2006 baik JP umum maupun JP khusus ;
L.	Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 dan foto copy Surat Pertanggungan

Hal. 59 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



	<p>jawab Keuangan Belanja Rutin Non Belanja RSJD Surakarta Tahun 2002 ;</p> <p>Foto copy Perubahan Anggaran belanja Rutin Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 dan foto copy Surat Pertanggung jawaban Keuangan Belanja Rutin Non Belanja RSJD Surakarta Tahun 2003 ;</p> <p>Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 dan foto copy Surat Pertanggung jawaban Keuangan Belanja Rutin Non Belanja RSJD Surakarta Tahun 2004 ;</p>
M.	<p>Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 440/09/2002 tentang Pengintegrasian Rumah Sakit Jiwa Pusat Surakarta dan Rumah Sakit Jiwa Klaten ke dalam Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;</p> <p>Foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 135/Men.Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tanggal 28 April 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa ;</p> <p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 37 Tahun 2006 tanggal 04 April 2006 serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah ;</p>
N.	<p>Pedoman Pelaksanaan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Program DP-PSE BK dan KS) tahun 2001 ;</p> <p>Foto copy Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM BDKES) tahun 2002 ;</p> <p>Pedoman Pelaksanaan Prgoram Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM BDKES) tahun 2003 ;</p> <p>Petunjuk Teknis Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM BDKES) Tahun 2003 ;</p>

Seluruhnya digunakan untuk perkara lain yakni an. Terdakwa dr. Hendrina A. Kuhuwael, Sp.Kj. dan dr. Rukma Astuti ;

Menetapkan Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 148/Pid.B/- 2008/PN.Ska. tanggal 20 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membebaskan Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN dari dakwaan Primair tersebut ;

Menyatakan Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana dakwaan Subsidaire Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menghukum Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan ;

Memerintahkan agar Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN ditahan ;

Menyatakan kepada dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.

Hal. 61 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

673.101.293 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng dengan dr. Siti Nuraini Arief, Sp.Kj. binti Munadji (Berita Acara Pemeriksaan terpisah/Splitz) jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

Pengajuan Dana JPS yang belum di klaimkan untuk bulan 27 November 2002 s/d 31 Desember 2002 bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 dan bulan 25 September 2004 s/d Desember 2004 ;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02/MENKES/KS/I/2006 tanggal 04 Januari 2006 tentang Penggantian Defisit Dana PKPS BBM BIDKES untuk pelayanan kesehatan pasien Miskin di Rumah Sakit tahun 2004 ;

Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 824/1725/8/2006 tanggal 19 Agustus 2006 tentang Pembentukan Panitia Realisasi Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta ;

Surat dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor : PS.01.01.1.3 tanggal April 2006 perihal permintaan tindak lanjut Verifikasi Itjen atas Pengelolaan Dana PKPS BBM BID KES pada RSJD Surakarta Tahun Anggaran 2004 ;

Surat dari Departemen Kesehatan RI Inspektorat Jenderal Nomor : 01.T.P.S.06.00212.06.250 tertanggal 24 April 2006 perihal Laporan Hasil Verifikasi Itjen Atas Pengelolaan Dana PKPS BBM tahun 2004 di 22 (dua puluh dua) rumah sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta hari Senin tanggal 15 Mei 2006 ;

Dokumen Anggaran Satuan Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 untuk RSJ Surakarta ;

Surat Tanda Setoran Nomor : 109/RSJD.Slo/2006 tanggal 16 Mei 2006 ke Bank Jateng Cabang Utama/Cabang Jawa Tengah Rekening Nomor : 1034.01503.977 sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

Surat Tanda Setoran Nomor : 60/RSJD.Ska/2006 tanggal 04 Agustus 2006 ke Bank Jateng Cabang Utama/Cabang Jawa Tengah Rekening Nomor : 1034.01503.7 sebesar Rp. 16.094.425,- (enam belas juta sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;

Kwitansi Penerimaan PDE tertanggal 03 Agustus 2006 sebesar Rp. 16.094.425,- (enam belas juta sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;

Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Nur Rosyid tertanggal 04 Mei 2006 ;

Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Nur Rosyid tertanggal 17 Juli 2006 ;

Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Tim Pembagi/Pembantu Kegiatan 19 Juli 2006 ;

Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Kusdiyah/Handayani/Nur Rosyid tertanggal 17 Juni 2006 ;

Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta kepada Nur Rosyid tertanggal 01 Agustus 2006 ;

Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 20 Juni 2006 ;

Data-data pasien miskin yang diajukan klaim ;

Data hasil verifikasi dari Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan ;

Hal. 63 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Direktur RSJD
Surakarta tahun 2002 – 2004 ;

Foto copy Buku Tabungan BRI dan BPD ;

Laporan Realisasi PKPS BBM Bid Kes tahun 2002 – 2004 ;

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkes RI Nomor :

HK.00.SISE.I.0198 tanggal 23 Februari 2005, perihal
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkes tentang
Pelaksanaan Program JPK-MM tahun 2005 ;

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1414
A/MENKES/SK/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005 beserta
lampirannya tentang Penggantian Defisit Dana PKPS BBM
BIDKES untuk Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin di
Rumah Sakit Tahun 2004 ;

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :
02/MENKES/SK/I/2006 tanggal 04 Januari 2006 beserta
lampirannya tentang Penggantian Defisit Dana PKPS BBM
Bidkes untuk Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin di
Rumah Sakit tahun 2004 ;

Surat Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Dep.Kes RI
Nomor : PS.01.01.1.3.1453 tanggal 17 April 2006
perihal Permintaan Tindak Lanjut Verifikasi Itjen
Atas Pengelolaan Dana PKPS BBM Bidkes pada RSJD
Surakarta Tahun Anggaran 2004 ;

Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI
tanggal 09 Mei 2005 perihal Rencana Anggaran Biaya
bagi Rumah Sakit yang devisit ;

Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Yankes
Gakin Nomor : KS.00.02.8.00.071 tanggal 26 Januari
2005 perihal Pembukuan Rekening RS di BRI Program JPK
MM ;

Surat dari Inspektorat Jenderal Depkes RI Nomor :
01.T.PS.06.00.212.06.450 tanggal 24 April 2006
perihal Laporan Hasil Verifikasi Defisit Dana PKPS
BBM tahun 2004 di 22 Rumah Sakit ;

Laporan Pertanggung Jawaban Dana PKPS BBM tahun 2001,
2002, 2003, 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kas Besar Dana PKPS BBM tahun 2001, 2002, 2003, 2004 ;

Tanda terima pembagian JP mulai Januari – Desember 2006 baik JP umum maupun JP khusus ;

Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2002 dan foto copy Surat Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2002 ;

Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 dan foto copy Surat Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2003 ;

Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 dan foto copy Surat Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2004 ;

Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 440/09/2002 tentang Pengintegrasian Rumah Sakit Jiwa Pusat Surakarta dan Rumah Sakit Jiwa Klaten ke dalam Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;

Foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 135/Men.Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tanggal 28 April 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa ;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 37 Tahun 2006 tanggal 04 April 2006 serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah ;

Pedoman Pelaksanaan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Program DPPSE BK dan KS) tahun 2001 ;

Foto copy Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM BIDKES) tahun 2002 ;

Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan

Hal. 65 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM BIDKES) tahun 2003 ;

Petunjuk Teknis Program Konpensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM BIDKES) Tahun 2003 ;

Uang sebesar Rp. 1.570.569.684,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

9. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 44/Pid/2009/- PT.SMG. tanggal 27 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20 November 2008 No. 148/Pid.B/2008/PN.Ska. yang dimintakan banding tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta.Pid/2009/- PN.Ska. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta.Pid/- 2009/PN.Ska. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 Kuasa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 September 2009 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2009, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Surakarta No. 16/Akta.Pid.B/2009/PN.Ska. tanggal 24 September 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 September 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan atau Pengadilan Tinggi Semarang telah khilaf hukum dalam memutus perkara tersebut karena :

a. Hakim telah menolak Eksepsi Terdakwa perihal penerapan

Hal. 67 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lex. Spesialis di terapkan lex generalis (padahal saksi ahli WIDODO TRESNO NOVIANTO, SH. (Fakultas Hukum UNS Surakarta) yang dihadirkan JPU menyatakan :

Bahwa, saksi memberikan penilaian untuk pelayanan pasien Gakin dalam alur pelaksanaannya harus menggunakan panduan aturan yang sifatnya lex spesialis yaitu Kep. Men. Kes. No. 777/MENKES/SK/VI/2002 dan bukan lex generalis atau undang-undang yang di atasnya ;

- b. Bahwa, dalam putusan tersebut berkaitan dengan dalam perkara Terdakwa Siti Nuraini Arif (Direktur RSJD Surakarta) tidak terdapat Pelaku Utama, kesemuanya adalah "Turut serta", sangat naif jika tidak ada pelaku utama dan atau yang menyuruh lakukan ;
- c. Bahwa, PERMENKES tidak ada satu pasalpun yang mencantumkan pasal pemidanaan ;
- d. Bahwa, barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana (Pasal 51 ayat (1) KUHP) ;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam persidangan perkara tersebut tidak pernah menunjukkan barang bukti berupa uang hasil penyitaan, bahkan dalam putusan disebut Berita Acara Penyitaan terdapat bukti penyetoran barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.570.569.684,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus enampuluh sembilan enam ratus delapan puluh empat rupiah) ke Bank BUKOPIN (Bank Swasta) Surakarta hal ini telah bertentangan dengan undang-undang, bahwa asset Negara yang berada dalam Kas Negara DILARANG DISITA oleh siapapun baik oleh Jaksa/Penuntut Umum (JPU) maupun oleh Pengadilan yang mengadili perkaranya terlebih penitipan DILARANG disetorkan ke Bank swasta, karena hal tersebut menunjukkan telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang, sehingga penyitaan dan penyimpanan barang bukti tersebut tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum ;

Bahwa, definisi DEFISIT terdapat kesimpang siuran interpretasi antara Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 148/Pid.B/2008/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta jo. No. 44/Pid/2009/PT.Smg. di Pengadilan Tinggi Semarang, sebagai berikut :

DEFISIT PKPS BBM menurut pemahaman BPK, adalah kekurangan dana Rumah Sakit sehingga meminjam pihak ke tiga untuk membayar pasien miskin yang telah dilayani Rumah Sakit (sesuai keterangan saksi ahli BPK) ;

DEFISIT PKPS BBM menurut pemahaman Departemen Kesehatan RI (Depkes) sama dengan RSJD Surakarta adalah, kekurangan dana khusus PKPS BBM Bidkes yang diperuntukkan membiayai pelayanan pasien miskin, alokasi pendanaan diperoleh dari APBN c/q Pemerintah Pusat, bukan alokasi dana anggaran dari APBD (karena tidak ada alokasi dana APBD yang dikhususkan untuk membiayai pasien miskin), sehingga harus ditagih berupa klaim biaya APBD yang diperuntukkan sebagai TALANGAN pembiayaan pasien miskin sesuai keterangan saksi ahli Bawasda Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tengah ;

4. Bahwa, Terdakwa wajib menandatangani isi formulir isian yang dilampirkan bersama surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. PR.03.02.1.1.4060 perihal Permintaan Isian Form Verifikasi RS/BP4/PKMM defisit tanggal 16 September 2005 ;

5. Bahwa, perintah menandatangani sesuai perintah tim Itjend. Verifikasi Dep. Kes. RI (lihat bukti) sesuai perintah jabatan berdasarkan tugas dan kewenangan Terdakwa untuk tunduk dan patuh sebagai Pegawai Negeri Sipil (PP. No. 30 Tahun 1980) ibaratnya seorang Hakim yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan sebuah perkara, kemudian diperintah pindah tugaskan ke lain kota dan atau Provinsi lain, maka tugas pokok dan kewenangan memeriksa atas perkara tersebut dilimpahkan

Hal. 69 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Hakim lain yang berkewenangan untuk itu dengan tidak melanggar undang-undang ;

6. Bahwa, Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 777/MENKES/SK/VI/- 2002 dan kemudian diatur dalam Kep. Men. Kes. No. 553/MENKES/SK/- IV/2003 tertanggal 22 April 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPS BBM bidang Kesehatan tidak secara eksplisit mengatur siapa yang WAJIB MEMBIAYAI program tersebut, sehingga peraturan tersebut TIDAK JELAS alias KABUR ;
7. Bahwa, sistem pelaksanaan dan program PKPS BBM Bidkes sangat tidak jelas dan tumpang tindih dengan aturan Menteri Keuangan dan atau Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang Otonomi Daerah dan atau Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat ;
8. Bahwa, keberatan Terdakwa atas ketidak hadirannya saksi kunci dalam dakwaan dan tuntutan JPU semestinya membuktikan bahwa JPU tidak mampu membuktikan dakwaannya akan tetapi dianulir oleh Majelis Hakim dengan hanya membacakan keterangan dalam BAP JPU hal ini bertentangan dengan undang-undang dan KUHAP saksi JPU yang TIDAK PERNAH HADIR (sudah 3 x dipanggil Pengadilan secara patut) hanya di BAP saja :
dr. BUDIHARDJA, DTM. & H,MPH (Ka.Din.Kes. Prov. Jawa Tengah tahun 2004) - MARDJIJONO, SH. (SEKDA Prov. Jawa Tengah tahun 2002 - 2006) ;
dr. FARID W. HUSAIN, Sp.BKBD. (masih menjabat Dir. Jend. Bina Pelayanan Medik tahun 2001 s/d tahun 2006 berdasarkan surat-surat yang dibuat dan ditandatanganinya) ;
Drs. AMAK ROCHMAD, MPH. (Direktur RSUP Dr. M. Jamil Padang) ;
Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa atas BAP para saksi JPU yang tetap dibacakan dalam persidangan meskipun Penasehat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa menolak karena sangat keberatan dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya para saksi tersebut sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara No. 14/Pid.B/2009/PN.Ska., Terdakwa sangat KEBERATAN, karena para saksi yang telah menerangkan dalam BAP tidak hadir TANPA KETERANGAN, kecuali dr. BUDIHARDJA, DTM & H,MPH hanya memberikan surat satu kali tertanggal 17 April 2009 kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut di Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan untuk tidak dapat hadir dalam persidangan tanggal 21 April 2009 saja, selebihnya tanpa keterangan, padahal keterangan para saksi JPU dalam BAP memberatkan Para Terdakwa secara sepihak dan melanggar ketentuan Bab IX Pasal 76 KUHP tentang sumpah atau janji ;

Atas keterangan dr. BUDIHARDJA, DTM & H,MPH Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan menolak dengan tegas keterangan saksi dalam BAP perihal tidak pernah menerima laporan defisit dana PKPS BBM dari RSJD Surakarta, karena JPU tidak mampu membuktikan bahwa tanda tangan dan cap Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tersebut didakwakan palsu padahal permintaan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan forensik dengan dakiloskopi dan dihadirkan saksi yang bersangkutan tidak dilaksanakan oleh JPU dan bahkan ditolak oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam kasus a quo ternyata RSUJ tidak mengalami defisit, akan tetapi Terdakwa dengan menggunakan data-data tahun 2001, 2002, 2003 dijadikan sebagai dasar untuk memintakan pengajuan klaim PKPS BBM, sekalipun RSUJ tidak mengalami defisit. Dengan demikian ada satu pelaksanaannya anggaran tahun 2001, 2002, 2003 dibiayai dua kali (doble pengeluaran), sehingga timbul kerugian

Hal. 71 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ;

Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti Pengadilan Negeri (di dalam halaman 131) telah mempertimbangkan bahwa tidak RSJD pernah mengalami defisit, dan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga tersebut ;

Bahwa Terdakwa telah menikmati uang tersebut akan tetapi berapa jumlahnya oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diperitungkan secara pasti ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 44/Pid/2009/- PT.SMG. tanggal 27 Mei 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 148/Pid.B/2008/PN.Ska. tanggal 20 November 2008 harus diperbaiki sekedar mengenai uang pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 44/Pid/2009/PT.SMG. tanggal 27 Mei 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 148/Pid.B/2008/PN.Ska. tanggal 20 November 2008 sekedar mengenai redaksi amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

Menyatakan Terdakwa dr. DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDRO GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

Pengajuan Dana JPS yang belum di klaimkan untuk bulan 27 November 2002 s/d 31 Desember 2002 bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 dan bulan 25 September 2004 s/d Desember 2004 ;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02/MENKES/KS/I/2006 tanggal 04 Januari 2006 tentang Penggantian Defisit Dana PKPS BBM BIDKES untuk

Hal. 73 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan pasien Miskin di Rumah Sakit tahun 2004 ;

Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 824/1725/8/2006 tanggal 19 Agustus 2006 tentang Pembentukan Panitia Realisasi Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta ;

Surat dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor : PS.01.01.1.3 tanggal April 2006 perihal permintaan tindak lanjut Verifikasi Itjen atas Pengelolaan Dana PKPS BBM BID KES pada RSJD Surakarta Tahun Anggaran 2004 ;

Surat dari Departemen Kesehatan RI Inspektorat Jenderal Nomor : 01.T.P.S.06.00212.06.250 tertanggal 24 April 2006 perihal Laporan Hasil Verifikasi Itjen Atas Pengelolaan Dana PKPS BBM tahun 2004 di 22 (dua puluh dua) rumah sakit ;

Rincian Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta hari Senin tanggal 15 Mei 2006 ;

Dokumen Anggaran Satuan Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 untuk RSJ Surakarta ;

Surat Tanda Setoran Nomor : 109/RSJD.Slo/2006 tanggal 16 Mei 2006 ke Bank Jateng Cabang Utama/Cabang Jawa Tengah Rekening Nomor : 1034.01503.977 sebesar Rp. 2.243.670.977,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

Surat Tanda Setoran Nomor : 60/RSJD.Ska/2006 tanggal 04 Agustus 2006 ke Bank Jateng Cabang Utama/Cabang Jawa Tengah Rekening Nomor : 1034.01503.7 sebesar Rp. 16.094.425,- (enam belas juta sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;

Kwitansi Penerimaan PDE tertanggal 03 Agustus 2006 sebesar Rp. 16.094.425,- (enam belas juta sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;

Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Nur Rosyid tertanggal 04 Mei 2006 ;
Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
kepada Nur Rosyid tertanggal 17 Juli 2006 ;
Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
kepada Tim Pembagi/Pembantu Kegiatan 19 Juli 2006 ;
Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
kepada Kusdiyah/Handayani/Nur Rosyid tertanggal 17
Juni 2006 ;
Memo dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
kepada Nur Rosyid tertanggal 01 Agustus 2006 ;
Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP)
tertanggal 20 Juni 2006 ;
Data-data pasien miskin yang diajukan klaim ;
Data hasil verifikasi dari Dirjen Pelayanan Medik
Departemen Kesehatan ;
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Direktur RSJD
Surakarta tahun 2002 – 2004 ;
Foto copy Buku Tabungan BRI dan BPD ;
Laporan Realisasi PKPS BBM Bid Kes tahun 2002 – 2004 ;
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkes RI Nomor :
HK.00.SISE.1.0198 tanggal 23 Februari 2005, perihal
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkes tentang
Pelaksanaan Program JPK-MM tahun 2005 ;
Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1414
A/MENKES/SK/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005 beserta
lampirannya tentang Penggantian Defisit Dana PKPS BBM
BIDKES untuk Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin di
Rumah Sakit Tahun 2004 ;
Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :
02/MENKES/SK/I/2006 tanggal 04 Januari 2006 beserta
lampirannya tentang Penggantian Defisit Dana PKPS BBM
Bidkes untuk Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin di
Rumah Sakit tahun 2004 ;
Surat Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Dep.Kes RI
Nomor : PS.01.01.1.3.1453 tanggal 17 April 2006
perihal Permintaan Tindak Lanjut Verifikasi Itjen Atas

Hal. 75 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dana PKPS BBM Bidkes pada RSJD Surakarta Tahun Anggaran 2004 ;

Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI tanggal 09 Mei 2005 perihal Rencana Anggaran Biaya bagi Rumah Sakit yang defisit ;

Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Yankes Gakin Nomor : KS.00.02.8.00.071 tanggal 26 Januari 2005 perihal Pembukuan Rekening RS di BRI Program JPK MM ;

Surat dari Inspektorat Jenderal Depkes RI Nomor : 01.T.PS.06.00.212.06.450 tanggal 24 April 2006 perihal Laporan Hasil Verifikasi Defisit Dana PKPS BBM tahun 2004 di 22 Rumah Sakit ;

Laporan Pertanggung Jawaban Dana PKPS BBM tahun 2001, 2002, 2003, 2004 ;

Buku Kas Besar Dana PKPS BBM tahun 2001, 2002, 2003, 2004 ;

Tanda terima pembagian JP mulai Januari – Desember 2006 baik JP umum maupun JP khusus ;

Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2002 dan foto copy Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Belanja Rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2002 ;

Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 dan foto copy Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Belanja Rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2003 ;

Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 dan foto copy Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Belanja Rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2004 ;

Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 440/09/2002 tentang Pengintegrasian Rumah Sakit Jiwa Pusat Surakarta dan Rumah Sakit Jiwa Klaten ke dalam Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;

Foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135/Men.Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tanggal 28 April 1978
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Jiwa ;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 37 Tahun 2006 tanggal
04 April 2006 serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah
Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah
Surakarta Provinsi Jawa Tengah ;

Pedoman Pelaksanaan Program Penanggulangan Dampak
Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial (Program DPPSE BK dan KS) tahun
2001 ;

Foto copy Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi
Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang
Kesehatan (PKPS BBM BIDKES) tahun 2002 ;

Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan
Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM
BIDKES) tahun 2003 ;

Petunjuk Teknis Program Kompensasi Pengurangan Subsidi
Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM BIDKES)
Tahun 2003 ;

Uang sebesar Rp. 1.570.569.684,- (satu milyar lima ratus
tujuh puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu
enam ratus delapan puluh empat rupiah) ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 oleh
Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. DR. Komariah E.
Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 77 dari 78 hal. Put. No. 2521
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Ketua Majelis ;

ttd./

I MADE TARA, SH.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338